

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PERTANGGUNG
JAWABAN PADA PDAM TIRTA MANAKARRA
KABUPATEN MAMUJU**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PERTANGGUNG
JAWABAN PADA PDAM TIRTA MANAKARRA
KABUPATEN MAMUJU**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

WINDA KAPRI

105731111119

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“hidup memang susah, maka jangan mengandalkan hasil andalkanlah keikhlasanmu dalam berjuang, nikmatilah perjuanganmu”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.

Kedua, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, bapak (kapriansa S.Pd) dan ibu (wirma) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada saya

Serta ketiga saudara saya dan semua pihak yang selalu membantu saya mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi

PESAN DAN KESAN

Selama saya kuliah di kampus universitas muhammadiyah makassar di Program Studi akuntansi, banyak hal yang saya dapat. Susah senang sudah saya lalui bersama teman-teman. Begitu banyak cerita yang telah kita lalui, saya bangga memiliki teman dan sahabat di kampus tercinta ini. Semoga kelak kita akan sukses.

Buat dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya kepada kami, tiada kata yang mampu saya ungkapkan selain terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik buat bapak ibu dosen dan kita semua.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Afauddin No. 295 pedung igra Lt. 7. Telf. (0411) 850972Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Sistem Akuntansi Bertanggung Jawab Pada PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

Nama Mahasiswa : Winda Kurni

No. Stambuk/ NIM : 10511111119

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis, diperiksa, dan diujikan di depan panitia penguji skripsi secara satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing

Dr. Muhammad Nasrun, S.ST., M.Si., Ak.
NIDN. 0920067702

Mutiarni, SE, M.Si
NIDN. 0930087503

Mengotahui

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

Mira, SE, M.Ak., Ak.
NBM :128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Igra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Winda Kapri, Nim: 105731111149 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi beranggotakan: Duran Kapri dan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/62201/091004/2023 Tanggal 11 Muharram 1445 H / 10 Juli 2023 Makassar. Syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 11 Muharram 1445 H
10 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Anis Asse, M.Aq
(Rektor Unismuh Makassar) |
| 2 | Ketua | Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3 | Sekretaris | Agusdwiana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wd I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4 | Penguji | 1. Anis, S.E., M.Si, AK, CA
2. Sy. Ramly, SE, M.Si
3. Agusdwiana Suarni, SE, M.Acc
4. Amin Arizah, S.Pd, M.Pd |

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung 100 Lt. 7. Tel. (0411) 855972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama: Mira Kapri
Stambuk: 10573111119
Jurusan: Akuntansi
Dengan judul: Implementasi Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban
Pada PDAM Tirta Manukera Kabupaten Mempu

Dengan ini menyatakan bahwa
**Skripsi Yang Saya Ajukan Didapan Tim Penguji Adalah Asli Hasil Karya
Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Muharram 1444 H
2023 M

Membuat Pernyataan

Diketahui Oleh

Dean

Ketua Program Studi

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 0902116603

Mira, SE, M.Ak., Ak
NBM : 125 6844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Winda Kapri
Nim : 105731111119
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada PDAM di
Makassar Kabupaten Mamuju

Beserta penghalang yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengahmadiformatikan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 11 Muharram 1444 H
29 Juli 2023 M

Membuat Pernyataan



Winda Kapri
105731111119



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “implementasi sistem akuntansi pertanggungjawaban pada pdam tirta manakarra kabupaten mamuju”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Starta (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Kapriansa S.Pd dan ibu Wirma yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudariku tercinta Wika mayangsari, Dian pratiwi, Dani kapri yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak. Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Muhammad Nasrun, S.ST.,M.Si.,Ak.,Ca, selaku pembimbing I yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Ibu Rini Sulistiyanti SE., M.Ak, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal Lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program akuntansi Angkatan 2019 khususnya Ak19B yang selalu belajar Bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman. Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Juni 2023

Penulis,

Winda Kapri

ABSTRAK

Winda Kapri 2023, Implementasi Sistem Akuntansi Pertanggung Jawaban Pada Pdam Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Dr. Muhammad Nasrun dan Pembimbing II Muttiarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan perdagangan dan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari tanggung jawab akuntansi di perusahaan. Hasil penelitian ini akan menggambarkan Struktur organisasi yang ditetapkan pada PDAM Tirta Manakkara sudah baik karena telah menunjukkan pusat pertanggungjawaban dari pimpinan paling atas ke pimpinan paling bawah serta terdapat pembagian tugas maupun pemisahan fungsi secara tegas dan jelas. Baik tugas, wewenang dan pelaporan menjelaskan hubungan vertikal yang ada dalam perusahaan, terdapat pula hubungan horizontal yang mana ditunjukkan dengan adanya koordinasi dari bagian satu dengan lainnya Dan Penilaian kinerja yang baik apabila menggunakan atau merealisasikan anggaran sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, penilaian kinerja yang ada pada PDAM Tirta Manakkara melihat selisih antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang direalisasikan mulai dari laporan pertanggungjawaban produksi yang sedang dikerjakan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan perusahaan daerah air minum berada di kabupaten mamuju sebagai objek penelitian. Data yang digunakan adalah data kualitatif dalam bentuk wawancara kepada seksi umum, seksi keuangan dan seksi langganan perusahaan.

Kata kunci: Implementasi akuntansi pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Winda Kapri 2023, Implementation of Accountability Accounting System at PDAM Tirta Manakarra, Mamuju Regency. Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Dr. Muhammad Nasrun and Supervisor II Muttiarni.

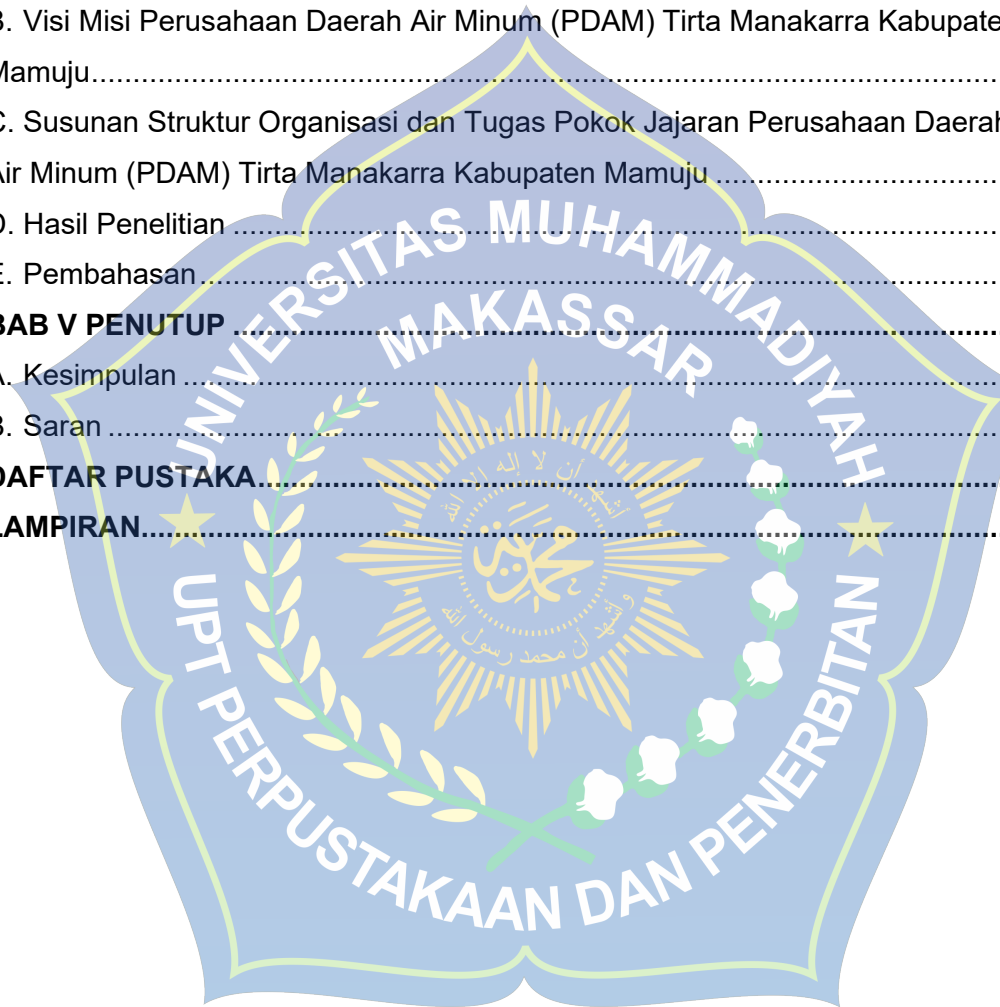
This study aims to determine the implementation of responsibility accounting in trading companies and to identify the advantages and disadvantages of responsibility accounting in companies. This type of research is qualitative research. Qualitative research can be understood as a research method that uses descriptive data in the form of written or spoken language from observable people and participants. The results of this study will illustrate that the organizational structure set at PDAM Tirta Manakarra is good because it has shown a center of responsibility from the top leadership to the lowest leadership and there is a clear and clear division of tasks and separation of functions. Both tasks, authority and reporting explain the vertical relationship that exists within the company, there is also a horizontal relationship which is indicated by the coordination from one part to another And a good performance appraisal when using or realizing the budget according to predetermined standards, existing performance appraisal PDAM Tirta Manakarra looks at the difference between budgeted costs and realized costs starting from the production accountability report that is being worked on to a higher level. This study uses regional drinking water companies in Mamuju district as research objects. The data used is qualitative data in the form of interviews with the general section, the finance section and the company subscription section.

Keywords: Implementation of responsibility accounting.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan teori	7
1. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban.....	7
2. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban	8
3. Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban	9
4. Fungsi Struktur Organisasi Dan Hubungannya Dengan Akuntansi Pertanggungjawaban	11
5. Perkembangan Akuntansi Pertanggungjawaban	16
B. Penelitian terdahulu	17
C. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Situs Dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis dan sumber data	28
E. Informan Penelitian	29

F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Metode analisis data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.....	33
B. Visi Misi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.....	34
C. Susunan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jajaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju	35
D. Hasil Penelitian	45
E. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu.....	18
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi pusat-pusat pertanggungjawaban :.....	13
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 3.1 struktur organisasi.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan.....	63
Lampiran 2 Jawaban	64
Lampiran 3 Dokumentasi.....	68
lampiran 4 laporan keuangan	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan yang akan dicapai, baik berupa laba yang maksimal, kelangsungan hidup, pertumbuhan perusahaan maupun menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat. Pengaruh lingkungan dan perkembangan suatu perusahaan yang semakin kompleks mengakibatkan tugas manajemen puncak dalam mencapai tujuan perusahaan semakin sulit dan kompleks pula. Untuk mengatasi hal tersebut maka perusahaan harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Peranan akuntansi pun semakin dibutuhkan terutama untuk memperoleh informasi tersebut.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah pengawasannya. Menurut sistem ini, unit-unit yang ada dalam organisasi dibagi menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban, dan keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem yang mengendalikan setiap kegiatan yang berada dalam area pusat pertanggungjawabannya. Kita dapat melihat adanya peranan dari Sistem informasi akuntansi pada saat pelaporan akuntansi pertanggungjawaban. Tanpa sistem informasi akuntansi yang baik, tidak akan terdapat laporan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang baik.

Pada dasarnya pusat pertanggungjawaban digunakan untuk menciptakan suatu sistem pertanggungjawaban yang baik , maka perlu dilakukan penyelesaian secara tegas antara batas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan . TA Konsep yang menyatakan batas antara

batas berwenang dan tanggung jawab menjadi dasar pembentukan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Batas yang berwenang dan tanggung jawab dapat dilihat dalam struktur organisasi perusahaan, karena itu struktur organisasi harus dirancang dengan baik sesuai dengan sifat dan kegiatan serta jenis operasi perusahaan atau menurut daerah operasinya. Dengan tidak adanya batasan batas yang berwenang dan tanggung jawab membuat perusahaan kesulitan dalam menentukan jenis pusat pertanggungjawaban yang ada pada perusahaan. karena itu struktur organisasi harus dirancang dengan baik sesuai dengan sifat dan kegiatan serta jenis operasi perusahaan atau menurut daerah operasinya. Dengan tidak adanya batasan batas yang berwenang dan tanggung jawab membuat perusahaan kesulitan dalam menentukan jenis pusat pertanggungjawaban yang ada pada perusahaan. karena itu struktur organisasi harus dirancang dengan baik sesuai dengan sifat dan kegiatan serta jenis operasi perusahaan atau menurut daerah operasinya. Dengan tidak adanya batasan batas yang berwenang dan tanggung jawab membuat perusahaan kesulitan dalam menentukan jenis pusat pertanggungjawaban yang ada pada perusahaan.

Implementasi akuntansi pertanggungjawaban sebelumnya sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Silalahi (2008) pada perusahaan PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar yaitu untuk mengetahui sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam mengukur kinerja pusat biaya, dan hasil penelitian yang dilakukan bahwa proses penyusunan anggaran biaya telah mengikuti konsep sistem akuntansi pertanggungjawaban, dapat dilihat dari setiap departemen telah menyusun anggarannya dan di laporkan kepada direksi untuk dievaluasi apakah sudah sesuai dengan rencana kerja tahunan perusahaan. Penelitian Damayanti (2004) pada PT. Pos Indonesia (Persero) menyatakan bahwa penyusunan anggaran pada perusahaan tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam penyusunan anggaran secara teknis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adharawati (2010) pada PT. Pelni yang berlokasi di Makassar, menyatakan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan tersebut, perusahaan perlu menerapkan akuntansi

pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian biaya. dan menyimpulkan bahwa pada perusahaan ini penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum memadai, dapat dilihat bahwa belum terpenuhinya indikator penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan diperlukan kerjasama yang baik antara manajemen tingkat atas dan manajemen unit kerja dibawahnya serta karyawan yang terlibat dalam proses menjalankan perusahaan dan setiap unit kerja yang ada di dalamnya harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Tanpa harus mengawasi langsung semua operasi bisnis, keberadaan akuntansi pertanggungjawaban kepemimpinan memungkinkan pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih efektif kepada tingkat kepemimpinan di bawahnya. Tingkat tanggung jawab dan kekuasaan yang berbeda akan ada di dalam organisasi sebagai akibat dari pendelegasian tugas dan kekuasaan ini. Penting juga untuk menilai akuntansi pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa itu berfungsi secara efektif sehingga manajemen dapat dengan mudah menetapkan biaya yang dikeluarkan untuk manajer pusat pertanggungjawaban yang akuntabel. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan tanggung jawab di setiap unit kerja atau departemen sangatlah penting. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang tepat dapat memotivasi bisnis untuk mencapai tujuan mereka.

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu perusahaan milik daerah khususnya berada di Kabupaten Mamuju yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Kantor PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju merupakan penginstansian pemerintahannya yang memanejemi perbidangan distribusi air dimana pemberian sebuah layanannya bagi masyarakat umum di Kabupaten Mamuju.

Dengan adanya pelayanan barang maupun jasa yang diberikan oleh Kantor PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju maka pihak Kantor PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju wajib memperoleh pementingan serta mengkedepankannya serta memiliki kualitasnya sebuah layanan kejaasaan yang diperoleh dikarenakan kecincraan kualitasnya yang bagus bukan sebaliknya yang didasarkan pada sebuah kesudut pandangannya maupun prespektif keberpihakan menyediakan penjasaan lainnya yang didasarkan kepada sebuah kesudut pandangannya maupun prespektif konsumen. Namun saat ini, masih ditemukan ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan yaitu berupa keluhan-keluhan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan.

Sebagai BUMD yang mempunyai peran penting, PDAM Tirta Manakarra dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat atau konsumennya tetapi dalam kenyataannya PDAM Tirta Manakarra masih belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumennya, terlihat masih terjadi fenomena-fenomena masalah yang terkait di Kantor-kantor PDAM Tirta Manakarra seperti misalnya masih rendahnya akuntabilitas pelayanan yang sering terlihat dalam pemberian pelayanan di Kantor PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju, ini dapat ditemukan ketika organisasi pelayanan publik harus mempertanggungjawabkan konsistensi mereka atas prosedur pelayanan. Hal ini juga terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti misalnya prosedur yang berbelit-belit, informasi yang tidak jelas, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, kepastian biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan hal-hal lainnya.

Selain itu, fenomena yang terkait masalah khususnya pelayanan Adminsitrasi dari Kantor Pelayanan PDAM Tirta Manakarra tersebut yaitu masalah menyangkut pelayanan sambungan aliran baru yang masih sering terlihat kurang tanggap dalam pemberian pelayanan di Kantor-kantor PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju, dan jika ditinjau dari masalah yaitu pelanggan masih menunggu dengan proses yang cukup lama dengan

prosedur atau syarat-syarat yang kurang jelas dipahami masyarakat dan juga lambatnya sistem pelayanan administrasi dikarenakan karyawan atau staf belum maksimal melaksanakan kewajibannya dalam proses pelayanan.

Fenomena-fenomena diatas dapat menciptakan citra yang negatif dari masyarakat dan dapat membawa dampak yang buruk bagi organisasi tersebut. Dari pernyataan diatas, tersirat bahwa suatu pelayanan selalu melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu organisasi atau pihak pemberi layanan dengan masyarakat sebagai pihak penerima layanan, dan sistem layanan pada umumnya, merupakan suatu kegiatannya kepada sebuah keusahaan yang dilaksanakan oleh seorang maupun individu maupun sekelompok masyarakat atau sebuah perinstansian yang ditentukan guna membagikan bantuannya serta kemudahan kepada masyarakatnya yang memiliki kepentingannya didalam organda itu sendiri didalam kerangkaan untuk pencapaian tujuannya sejalan bersama penagaturan perpokokan serta tatacaraan yang sudah ditetapkannya

Dalam perspektif publik, fenomena-fenomena yang menyangkut pelayanan publik harus secepatnya diatasi oleh pemerintah. Jikalau pemerintah konsisten mengatasi permasalahan yang menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, keinginan dan harapan masyarakat yang tidak didengar, hak-hak yang dibatasi, aspek dan peluang publiknya dihambat, adanya dominasi hak rakyat, bahkan pilihan untuk kebutuhan-kebutuhan dan suara demokrasi yang substantif telah ditinggalkan atau diabaikan begitu saja oleh pejabat, ini agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju. Dengan mencermati fenomena-fenomena dan permasalahan pelayanan yang terjadi pada Kantor PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul "implementasi aiatem akuntansi pertanggungjawaban pada PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akuntansi pertanggungjawaban PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju, serta kelebihan dan kekurangan akuntansi pertanggungjawaban yang telah diterapkan PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi pertanggungjawaban PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju, serta kelebihan dan kekurangan akuntansi pertanggungjawaban yang telah diterapkan PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju.

D. Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan pemahaman penulis tentang penggunaan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat evaluasi kinerja di tempat kerja.
2. Bagi Perusahaan
Dapat digunakan sebagai masukan untuk mengevaluasi kinerja manajer dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban.
3. Bagi Pihak lain
dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja manajer dengan memanfaatkan akuntansi pertanggungjawaban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban

Akuntansi akuntabilitas adalah suatu sistem yang dibangun sesuai dengan sifat dan jalannya perusahaan, yang tujuannya adalah agar setiap unit organisasi bertanggung jawab atas hasil operasi unit-unit yang berada di bawah pengawasannya. Ada berbagai sudut pandang tentang definisi akuntansi pertanggungjawaban, dengan Hansen dan Mowen (2009: 229) menyatakan bahwa itu "ditentukan melalui empat elemen penting, yaitu memberi tanggung jawab, membuat pengukuran kinerja atau benchmarking, mengevaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan," menurut definisi mereka.

Sjahrial (2012: 261) menjelaskan "akuntabilitas akuntansi" sebagai suatu teknik untuk mengevaluasi efektivitas pusat-pusat pertanggungjawaban yang telah dipilih sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Menurut Mulyadi (1997:188), akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang terstruktur sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat tanggung jawab dalam organisasi, dengan tujuan agar seseorang atau kelompok dapat ditunjuk bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan atau pendapatan yang dianggarkan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan dua pendapat yang dikemukakan di atas bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang membandingkan rencana (anggaran) dengan tindakan (hasil aktual) dari masing-masing pusat pertanggungjawaban dan digunakan untuk

menilai seberapa baik kinerja individu, aktivitas perusahaan, atau departemen. bekerja dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan.

2. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

Terciptanya sistem informasi akuntansi untuk setiap pusat pertanggungjawaban merupakan keunggulan penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

Mulyadi mengklaim bahwa "Akuntansi untuk Akuntabilitas" melibatkan pengumpulan data masa depan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran. Kutipan ini menyoroti tiga keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban:

- a. Akuntansi untuk akuntabilitas berfungsi sebagai dasar untuk membuat anggaran. Hanya ketika ada akuntansi akuntabilitas, yang menilai berbagai nilai dari sumber daya yang diberikan kepada setiap manajer yang berkontribusi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk tahun fiskal, penganggaran dapat dibayangkan. Proses pembuatan anggaran pada dasarnya melibatkan identifikasi orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan sumber daya yang dialokasikan untuk orang-orang tersebut.
- b. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bagi manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Evaluasi kinerja seseorang dalam peran yang ditugaskan dikenal sebagai penilaian kinerja. Manajer pusat tanggung jawab akan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang

didelegasikan oleh manajemen atas. Kinerja manajer akan lebih mudah dievaluasi jika tujuan dan tanggung jawabnya jelas.

- c. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai insentif manajerial Jika seseorang merasa bahwa usaha kerasnya akan dihargai, dia akan lebih terdorong untuk bekerja. Manajer mungkin didorong untuk mengambil tindakan korektif untuk kesalahan atau kinerja di bawah standar melalui akuntansi pertanggungjawaban. Sistem yang digunakan dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk memberi insentif kepada manajer adalah penghargaan dan hukuman. Insentif yang diberikan, manajer akan secara sadar didorong untuk bekerja menuju tujuan mereka.

3. Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Menerapkan akuntansi pertanggungjawaban memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Secara bertanggung jawab Hanya untuk setiap tingkat manajemen biaya dicatat, dikelompokkan, dan dilaporkan, dan setiap tingkat manajemen hanya dibebani dengan biaya yang berada di bawah kewenangannya. Akibatnya, biaya dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif dan efisien.
- b. Untuk pengendalian biaya, karena pengeluaran dan pendapatan yang dilaporkan harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya selain dikategorikan menurut pusat tanggung jawab. Oleh karena itu, akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengoperasian yang tepat dari sistem anggaran.
- c. Membantu manajemen dalam pengendalian dengan mengidentifikasi variasi antara hasil aktual dan anggaran yang direncanakan.

- d. Dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk menentukan standar penilaian efektivitas unit bisnis tertentu.
- e. Dapat berfungsi sebagai peta jalan untuk memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan bisnis untuk mencapai tujuannya.
- f. Dapat menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan divisi-divisi perusahaan saat ini karena manajemen puncak dan manajer puncak dapat secara berkala mengevaluasi operasi masing-masing area yang berada di bawah kendali mereka.

Tujuan pusat pertanggungjawaban adalah untuk mendukung implementasi strategi. Karena organisasi terdiri dari beberapa pusat tanggung jawab, jika strateginya baik, tujuan pusat tanggung jawab individu dan perusahaan secara keseluruhan akan tercapai.

Menurut konsep akuntansi pertanggungjawaban Mulyadi, untuk menggunakannya, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

a. **Struktur Organisasi**

Selain menyatakan dengan jelas posisi dan aliran setiap karyawan, struktur organisasi juga harus mencantumkan semua tugas yang dilakukan setiap karyawan untuk setiap tingkat manajemen. Dalam hal ini, wewenang berpindah dari tingkat manajemen atas ke bawah, meskipun tanggung jawabnya sama.

b. **Anggaran**

Anggaran harus dibuat dengan masukan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban karena berfungsi sebagai gambaran rencana kerja manajer yang akan dilakukan dan tolok ukur untuk mengukur kinerja mereka.

c. **Penggolongan Biaya**

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya harus dibagi menjadi biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan karena tidak semua biaya yang timbul dalam satu bagian dapat dikelola oleh manajemen yang hanya diminta untuk memperhitungkan biaya yang dapat dikendalikan.

d. **Sistem Akuntansi Biaya**

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada setiap tingkat manajemen yang terbagi menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali akan ditanggung oleh tingkat tersebut sebagai pusat biaya. Biaya harus dikategorikan dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen struktur organisasi karena akan dihitung untuk setiap tingkat manajer.

e. **Sistem Pelaporan Biaya**

Setiap bulan, divisi akuntansi biaya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat biaya. Melaporkan pertanggungjawaban sesuai dengan level manajemen yang akan menerimanya.

4. Fungsi Struktur Organisasi Dan Hubungannya Dengan Akuntansi Pertanggungjawaban

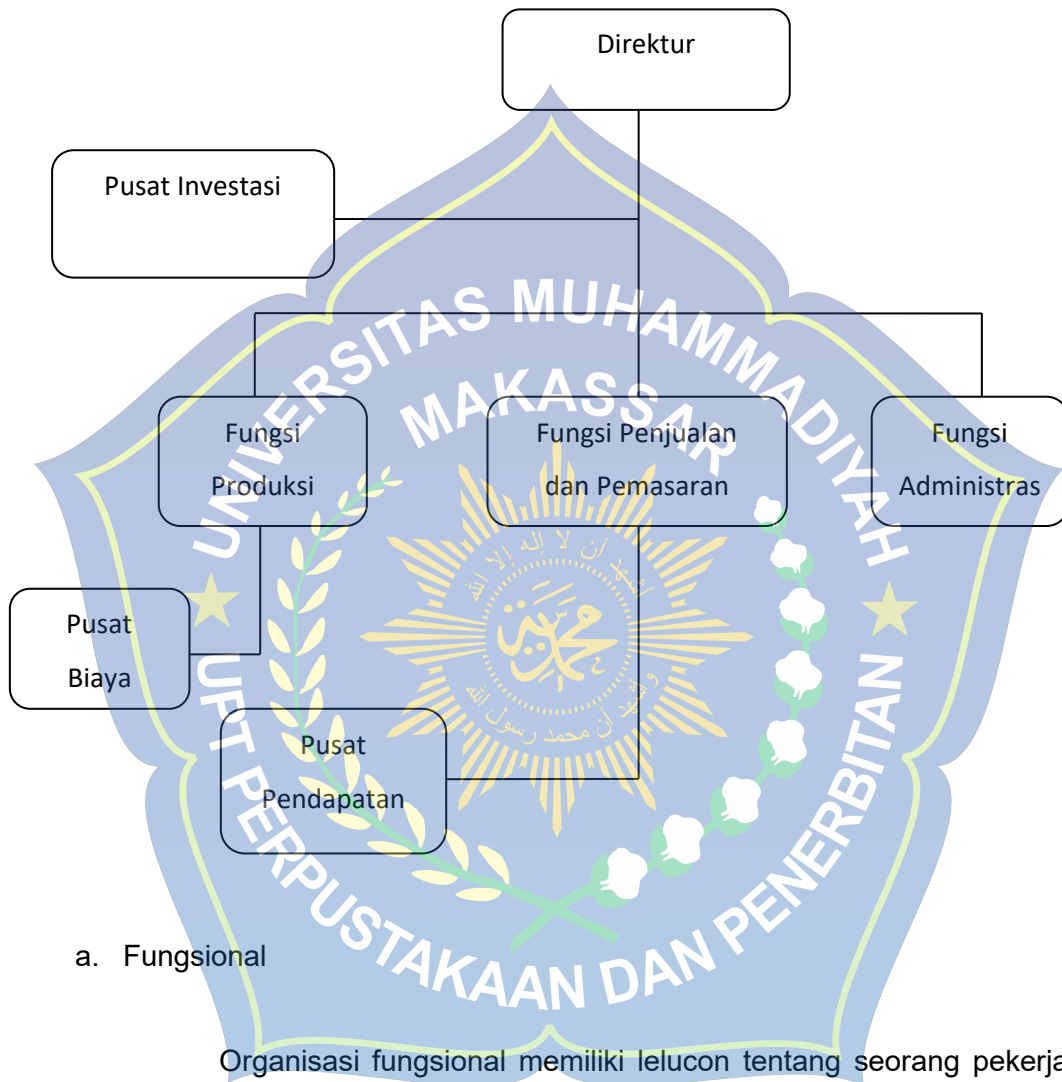
Agar semua karyawan memahami peran dan tugasnya di dalam perusahaan, harus ada struktur organisasi yang sehat. Hubungan kepemimpinan dan karyawan yang baik dapat diatur dengan struktur organisasi yang kuat. Divisi atau struktur organisasi dalam suatu perusahaan menentukan bagaimana wewenang dan tanggung jawab dialokasikan. Pengorganisasian operasi pengumpulan dan pemrosesan data dalam suatu

perusahaan ditentukan oleh tuntutan informasi, sehingga sangat penting untuk memiliki pengetahuan yang jelas tentang wewenang dan tanggung jawab. Eksekusi yang tepat dari tugas-tugas manajemen bisnis dan pencapaian kontrol yang baik di dalam suatu organisasi keduanya bergantung pada struktur organisasi.

Akuntansi reputasi sangat bergantung pada struktur organisasi. Hal ini terjadi karena struktur organisasi merepresentasikan bagaimana korporasi membagi kewenangan. Manajemen mendelegasikan otoritas melalui hierarki organisasi dengan menugaskan tugas-tugas khusus kepada manajemen di bawahnya untuk meningkatkan efisiensi pembagian kerja. Untuk mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan, sistem akuntansi pertanggungjawaban pertama-tama harus menganalisis garis kekuasaan dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan.

Ada dua tipe struktur organisasi yang berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban :

Gambar 2.1 Struktur organisasi yang berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban :

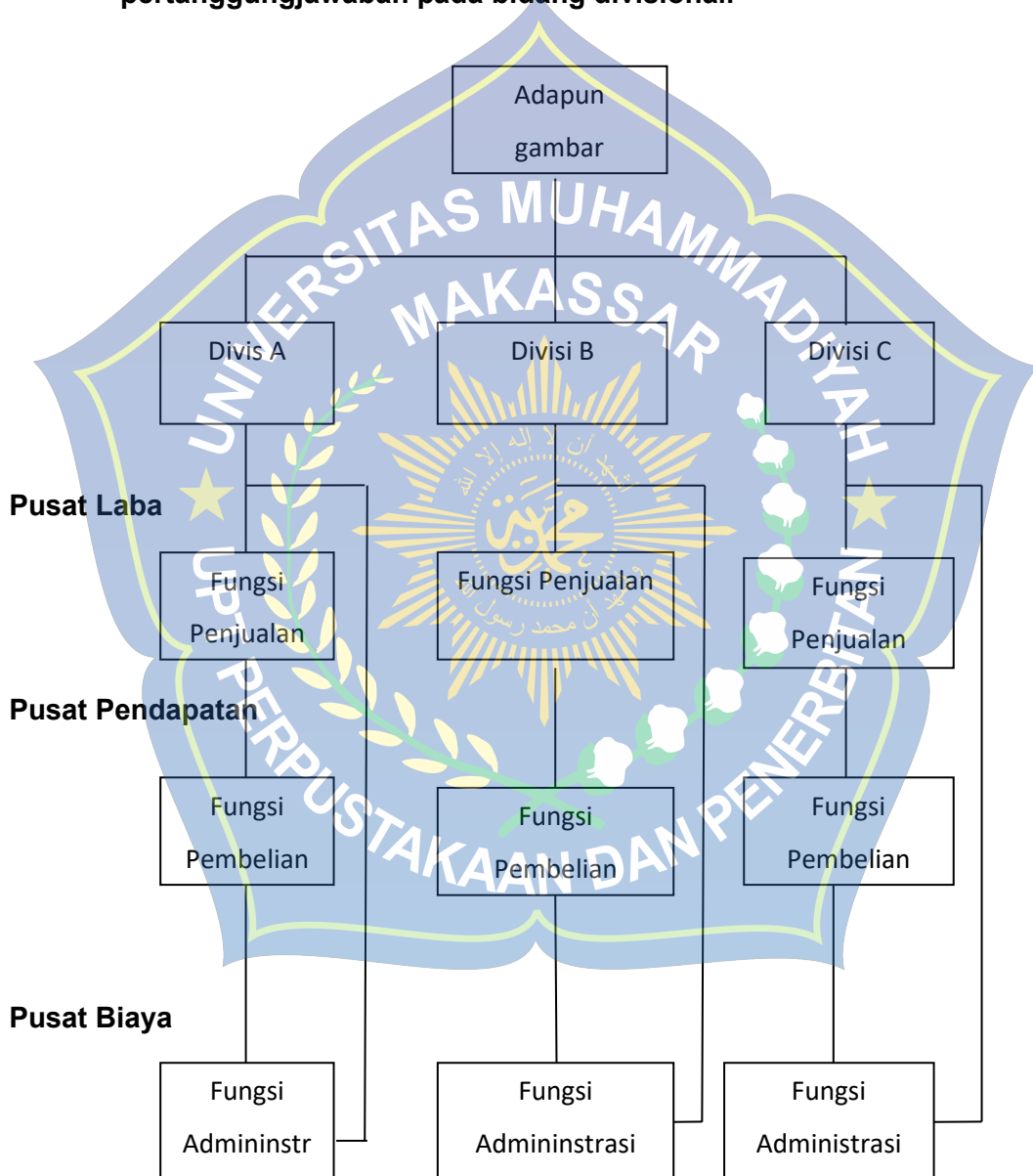


a. Fungsional

Organisasi fungsional memiliki lelucon tentang seorang pekerja yang memiliki pengetahuan khusus untuk melakukan fungsi tertentu dan yang lebih berpengalaman daripada rata-rata pekerja yang mungkin tidak memiliki pengetahuan itu. Pembagian pusat pertanggungjawaban dalam organisasi fungsional didasarkan pada fungsi produksi, pengadaan, dan administrasi.

Adapun gambar dibawah ini merupakan struktur organisasi akuntansi pertanggungjawaban pada bidang divisional.

Gambar 2.2 struktur organisasi akuntansi pertanggungjawaban pada bidang divisional.



b. Unit Bisnis (Divisional)

Dalam organisasi divisional, organisasi dibagi atas dasar pembagian di bagian atas dan fungsi di bagian bawah. Manajer perusahaan bertanggung jawab atas seluruh organisasi dan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan investasi; Selain itu, kepala divisi masing-masing hanya membawahi divisinya masing-masing. Direktur Divisi A dalam organisasi semacam ini Bagian B Bagian C Fungsi dalam penjualan Fungsi Administrasi Fungsi Penjualan Fungsi Pembelian Fungsi Administrasi Fungsi Pembelian Fungsi penjualan dan pembelian Peran administratif setiap divisi berfungsi sebagai pusat, pusat biaya dan/atau pusat pendapatan, dan juga dapat berfungsi sebagai pusat investasi.

Struktur organisasi harus diperiksa dalam kaitannya dengan pusat pertanggungjawaban untuk menemukan potensi kekeliruan dalam pendelegasian wewenang. Jika struktur yang mendasari diatur secara logis, jaringan pusat pertanggungjawaban dapat menjadi instrumen yang efisien untuk mengatur perusahaan. Suatu struktur yang memungkinkan bawahan mengalami otonomi (desentralisasi) dan yang secara jelas membedakan wewenang dan kewajiban dari setiap bagian yang ada sejalan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban. Sebagai pengakuan keberadaan pusat pertanggungjawaban, kriteria ini merupakan kebutuhan mendasar untuk mengadopsi akuntansi pertanggungjawaban.

c. Anggaran

Saat mengelola bisnis, manajemen menetapkan tujuan atau sasaran dan kemudian membuat rencana tindakan untuk melaksanakannya. Proses persiapan anggaran kemudian digunakan untuk mempersiapkan dan menilai perkiraan dampak keuangan dari rencana kerja tersebut. Mengikuti pembuatan dan implementasi anggaran, akuntansi biaya berfungsi untuk menginformasikan manajemen tentang penggunaan sumber daya selama pelaksanaan rencana aktivitas. Manajemen dapat mengidentifikasi penyimpangan dari aktivitas yang direncanakan dengan membandingkan dan menganalisis pengeluaran aktual dengan biaya yang dianggarkan. Informasi ini kemudian dapat digunakan oleh manajemen sebagai landasan untuk tindakan perbaikan.

5. Perkembangan Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi untuk tanggung jawab adalah bidang yang dinamis. Akuntansi pertanggungjawaban telah melahirkan sejumlah inovasi, termasuk akuntansi tradisional dan akuntansi aktivitas. Penjelasan dari masing-masing berikut:

a) **Akuntansi Tradisional**

Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk dapat mengidentifikasi individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas varians dari proyeksi biaya atau pendapatan dengan menyusun pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan sesuai dengan pusat tanggung jawab dalam bisnis.

Akuntansi akuntabilitas tradisional mengacu pada penggunaan pendekatan manual, yang melibatkan panggilan dari masing-masing kelompok anggota.

Metode akuntansi ini memberikan keuntungan sebagai landasan untuk membuat anggaran, mengevaluasi efektivitas manajer pusat pertanggungjawaban, dan menginspirasi manajer.

b) Akuntansi Aktivitas

Sistem akuntansi dengan kerangka kerja yang memisahkan aktivitas penambah nilai dari aktivitas yang tidak menambah nilai sambil mengumpulkan dan melaporkan biaya. Karena mendasarkan pelaporan pada tindakan daripada kelompok, sistem akuntansi ini lebih canggih.

Akuntansi tanggung jawab aktivitas dapat membantu untuk memfasilitasi tugas-tugas manajerial dan melacak seberapa baik rencana keuangan perusahaan bekerja. Setiap bisnis bertanggung jawab atas aspek pengembangan akuntansi yang berbeda. Dua inovasi yang disebutkan di atas adalah contoh jenis yang dapat disesuaikan untuk bisnis Anda.

Anda mungkin lebih mampu melaporkan setiap area dengan akurat jika menggunakan akuntansi tradisional. Di sisi lain, akuntansi aktivitas memungkinkan Anda melacak pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian terhadap pokok bahasan yang sedang dihadapi guna memperkuat teori yang akan diterapkan saat mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang tercantum di bawah ini, yang dapat

ditemukan di sejumlah jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meliputi:

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Elsa Meirina Et.Al, (2020)	Pengaruh Partisipan Anggaran Dan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pdam Kota Padang	Jenis Penelitian Adalah Kuantitatif	Partisipasi Anggaran Berpengaruh Dan Signifikan Terhadap Kinerja Manajerial Pdam Kota Padang. Hal Ini Ditunjukkan Oleh nilai Koefisien Regresi Bertanda Positif Sebesar 0,408. Hal Ini Juga Dibuktikan Dengan Hasil Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Nilai Tstatistik Sebesar 2,050 > Ttabel Sebesar 1,602 Dan Nilai Sig 0,048
2	Munthe, Desi Triana 2019-03	Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Pusat Pertanggungja	Jenis Penelitian Adalah Penelitian Assosiatif.	Penelitian Ini Membuktikan Bahwa, Pertama, Pengaruh Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pusat Pertanggungjawaban Biaya, Kedua, Pengaruh Sistem Informasi

		waban Biaya Pada Pdam Tirtanadi Di Sumatera Utara		Akuntansi Manajemen Berpengaruh Terhadap Kinerja Pusat Pertanggungjawaban Biaya , Ketiga, Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Berpengaruh Terhadap Kinerja Pusat Pertanggungjawaban Biaya.
3	Puteri Tiara Dwiana. (2014)	Peranan Akuntansi Pertanggungjawan Dalam Menilai Kinerja Pusat Biaya Pdam Tirta Musi Palembang	Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif	Dari Hasil Penelitian Di PDAM Tirta Musi Palembang, Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Di PDAM Tirta Musi Palembang Masih Belum Efektif Dikarenakan Dalam Laporan Kinerja Belum Memisahkan Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali. Dari Analisis Kuantitatif Diperoleh Hasil Bahwa PDAM Tirta Musi Palembang Mengalami Penyimpangan Merugikan Terhadap Varians Bahan Baku.

4	Puteri Tiara Dwiana. 2022	Penerapan Akuntansi Pertanggungja waban Dalam Menilai Kinerja Pusat Biaya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar	Metedo Penelitian Yang Digunakan Adalah Deskriptif Kualitatif.	Hasil Penelitian Menunjukka Bahwa Melakukan Penyusunan Anggaran Untuk Bagiannya Sendiri, Yang Ditetapkan Secara Bottom-Up, Dimana Tiap Bagaian Atau/ Fungsi Terlebih Dahulu Membuat Anggaran Untuk Kemudian Diajukan Ke Manajemen. Proses Ppelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Perusahaan Baik. Dengan Adanya Pembagian Anggaran Yang Dibandingkan Dengan Realisasi.
5	Hutami Nurul Adinda Suparno, 2019	Analisis Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungja waban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Gowa	Jenis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Kualitatif	Hasil Penelitian Dari Penilaian Kinerja Dapat Dikatakan Belum Memadai. Hal Ini Dikarenakan PDAM Gowa Belum Menerapkan Sistem Reward Dan Punishment Yang Jelas Terhadap Manajer Pusat Biaya, Agar Dapat Meningkatkan Kesadaran Para

				Manajer Untuk Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka Dengan Baik Serta Memotivasi Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban Untuk Meningkatkan Kinerjanya.
6	Nur Azizah, (2021)	Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Bantaeng	Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng. Positif Memiliki Arti Bahwa Perubahan Kinerja Manajerial Dengan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban. Sehingga, Semakin Tinggi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Maka Semakin Meningkatkan Pula Kinerja

				Manajerialnya, Begitu Pula Sebaliknya.
7	Fitri Sulastri. 2020-05-20	Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pdam Mual Na Tio Tapanuli Utara	Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Partisipasi Anggaran Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Manajerial Pada PDAM Mual Na Tio Tapanuli Utara. Akuntansi Pertanggungjawaban Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Manajerial Pada PDAM Mual Na Tio Tapanuli Utara. Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Manajerial Pada PDAM Mual Na Tio Tapanuli Utara.
8	Anggun Putri Anik. 2013	Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi	Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dengan Metode Analisis Deskriptif.	Hasil Penelitian Diketahui Bahwa Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Perusahaan Belum Memadai Karena Belum Ada Penggolongan Biaya

				Dan Pemberian Kode Rekening. Suatu Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dapat Dikatakan Memadai Jika Telah Memenuhi Syarat Dan Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban.
9	Sicylia Aliu. 2013	Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Dan Penilaian Kinerja	Metode Analisis Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Deskripti	Hasil Penelitian Menunjukkan Anggaran Yang Disusun Oleh Perusahaan Belum Efektif Karena Tidak Melibatkan Bagian Produksi Dalam Proses Penyusunan Anggaran. Dalam Penggolongan Biaya Pada Perusahaan Tidak Adanya Pemisahan Biaya Yang Dapat Dikendalikan Dan Biaya Yang Tidak Dapat Dikendalikan Dari Bagian Manajer Produksi. Struktur Organisasi Dari Perusahaan Hanya Terbagi Beberapa Tingkatan Wewenang Dan Tanggungjawab, Sehingga Yang Terlibat Dalam Proses

				Perencanaan Hanya Terbatas Pada Beberapa Orang Saja, Maka Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Belum Efektif Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Dan Penilaian Kinerja Perusahaan.
10	Ardiani, Wirasedana, 2013	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya	Adapun Teknik Analisis Yang Digunakan Adalah Analisis Regresi Linear Sederhana	Berdasarkan Hasil Analisis Diperoleh Hasil Yang Menunjukkan Bahwa Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Memberikan Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya. Perusahaan Diharapkan Dapat Membuat Struktur Organisasi Yang Lebih Baik, Melakukan Pemisahan Antara Biaya Terkendali Dan Biaya Tidak Terkendali Serta Membuat Sistem Pengkodean Biaya Yang Dapat

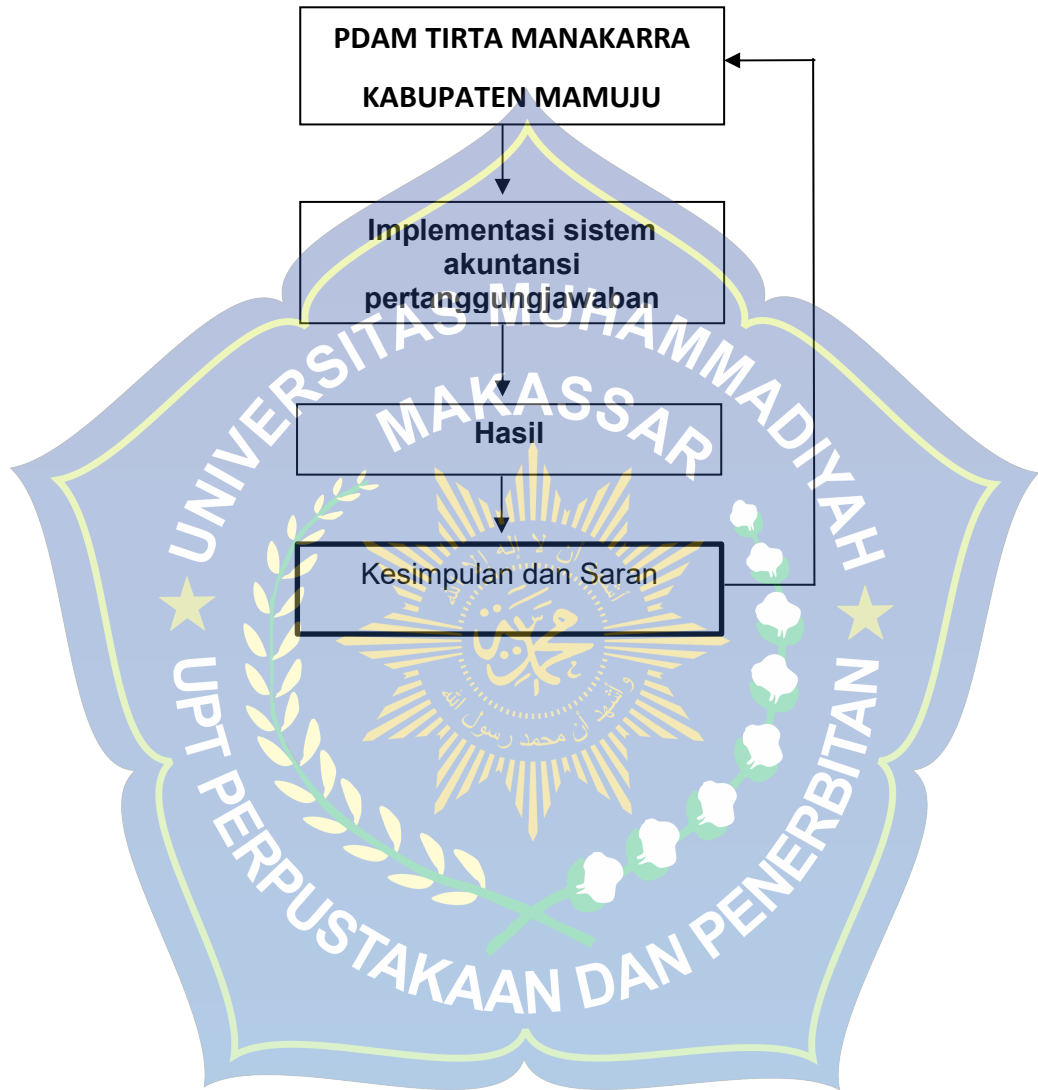
				Mengidentifikasi Biaya-Biaya Disesuaikan Dengan Pihak Yang Memiliki Tanggungjawab.
--	--	--	--	--

Topik penelitian dan objek penelitian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimasukkan ke dalamnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berkonsentrasi pada jenis pusat pertanggungjawaban, penelitian kali ini meneliti bagaimana akuntansi pertanggungjawaban mempengaruhi kinerja manajerial di PDAM TIRTA MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU.

C. Kerangka Pikir

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah unit usaha milik daerah yang bergerak dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat umum. Di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terdapat PDAM. Sebagai sarana penyediaan air bersih, PDAM merupakan urusan daerah yang diawasi dan diawasi oleh aparaturnya pemerintahan dan legislatif daerah. Memanfaatkan sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat evaluasi kinerja akan membantu organisasi mencapai tujuannya.

Gambar 2.3 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tulisan atau lisan dari orang-orang dan partisipan yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi individu atau kelompok (Darwin et al., 2021).

proses penelitian metode kualitatif dimulai dengan pengembangan hipotesis yang mendasarinya. Kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Kemudian menafsirkan data yang dikumpulkan dalam survei (Darwin et al., 2021).

Definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama (bukan eksperimen). Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survei menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan kualitatif berarti bukan generalisasi (Darwin et al., 2021).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas oleh para ahli tersebut mengenai definisi penelitian kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan yaitu untuk memahami atau mengkaji secara rinci terkait dengan fenomena apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Darwin et al., 2021).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Sugiyono (2019) dalam Darwin et al. (2021) bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian ini akan fokus pada "implementasi akuntansi pertanggungjawaban pada PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju".

C. Situs Dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju untuk mengumpulkan data yang mereka inginkan untuk penelitian ini. Durasi periode pelaksanaan penelitian adalah 2 (dua) bulan tahun 2023.

D. Jenis dan sumber data

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lainlain. Adapun jenis data dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari lapangan yang diperoleh melalui pengamatan, dan wawancara. Menurut Indriantoro, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara, karena data

primer dikumpulkan oleh peneliti, maka diperlukan sumber daya yang cukup memadai, seperti biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan seperti pemilik usaha.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dan dicatat oleh instansi terkait atau pihak lain). Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan data sekunder seperti data yang sudah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), kelurahan, dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian.

E. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang memberikan berbagai macam informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga bagian yaitu (Darwin et al., 2021):

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam mengumpulkan data peneliti sebaiknya memulai dari informan kunci untuk mendapatkan informasi yang utuh atau menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala direktur PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju.
2. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara Teknik dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi

informan utama dalam penelitian ini yaitu Staf Keuangan staf keuangan PDAM tirta manakarra kabupaten mamuju.

3. Informan tambahan adalah orang yang akan memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama dan informan kunci. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Staf Pegawai, Honorer di lingkungan PDAM tirta manakarra kabupate nmamuju.

F. Metode Pengumpulan Data

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, Teknik ini digunakan untuk mengambil gambar dan bahan referensi yang akan menjadi pendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang.
2. Observasi, pengumpulan data dilakukan dengan melihat dan mengamati kegiatan perusahaan secara langsung dan dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi . dalam penelitian ini dilakukan obsevasi agar dapat mendapatkan hasil yang relevan baik itu dalam gambar maupun tulisan yang akan dianalisis menjadi sebuah hasil penelitian.
3. Wawancara, dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab dengan pimpinan dan karyawan yang berhubungan dengan penelitian ini,

sehingga kita dapat memperoleh data yang real dan sesuai yang ingin kita capai (Darwin et al., 2021).

G. Metode analisis data

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang telah diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan atau objek yang di analisa. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menganalisis data dilapangan, yaitu analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara terpimpin dengan key person, dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan masalah yang terkandung di dalamnya. Bersamaan dengan pemilahan data tersebut peneliti mengambil data baru.
- b. Melakukan tahap analisis data yang telah terkumpul atau data yang baru diperoleh. Dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang terdahulu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis.
 - b. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan hasil pengamatan sebelumnya.

- c. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul.
- d. Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama penelitian berlangsung.

Selanjutnya setelah proses pengumpulan data selesai, maka peneliti membuat laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian secara kualitatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semula bernama Badan Pengelolah Air Minum (BPAM) dan merupakan lembaga yang dalam pengelolaannya berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dimana pembentukannya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Mamuju secara kontinyu, pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 064/KPTS/CK/1982, tanggal 10 Mei 1982.

Seiring dengan perkembangan BPAM Kabupaten Mamuju pada saat itu hingga memasuki Tahun 1993, maka sebagai imbas dari pelaksanaan ketentuan otonomi daerah, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 72/KPTS/1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di beberapa Kabupaten termasuk Kabupaten Mamuju kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II masing – masing Kabupaten, maka sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri tersebut, sambil menunggu pengesahan pendirian PDAM dibentuklah Badan Pengelolah Air Minum Daerah (BPAMD) Kabupaten Mamuju sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mamuju Nomor : 006/III/1993, tanggal 31 Maret 1993.

B. Visi Misi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

Visi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju secara operasional adalah “ **Menjadi Perusahaan Yang Sehat Dengan Kualitas Pelayanan Prima** ” yang didukung dengan tenaga kerja profesional dalam pelayanan air minum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada Kota Kabupaten maupun Ibu Kota Kecamatan dan Desa.

Berikut adalah misi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan :

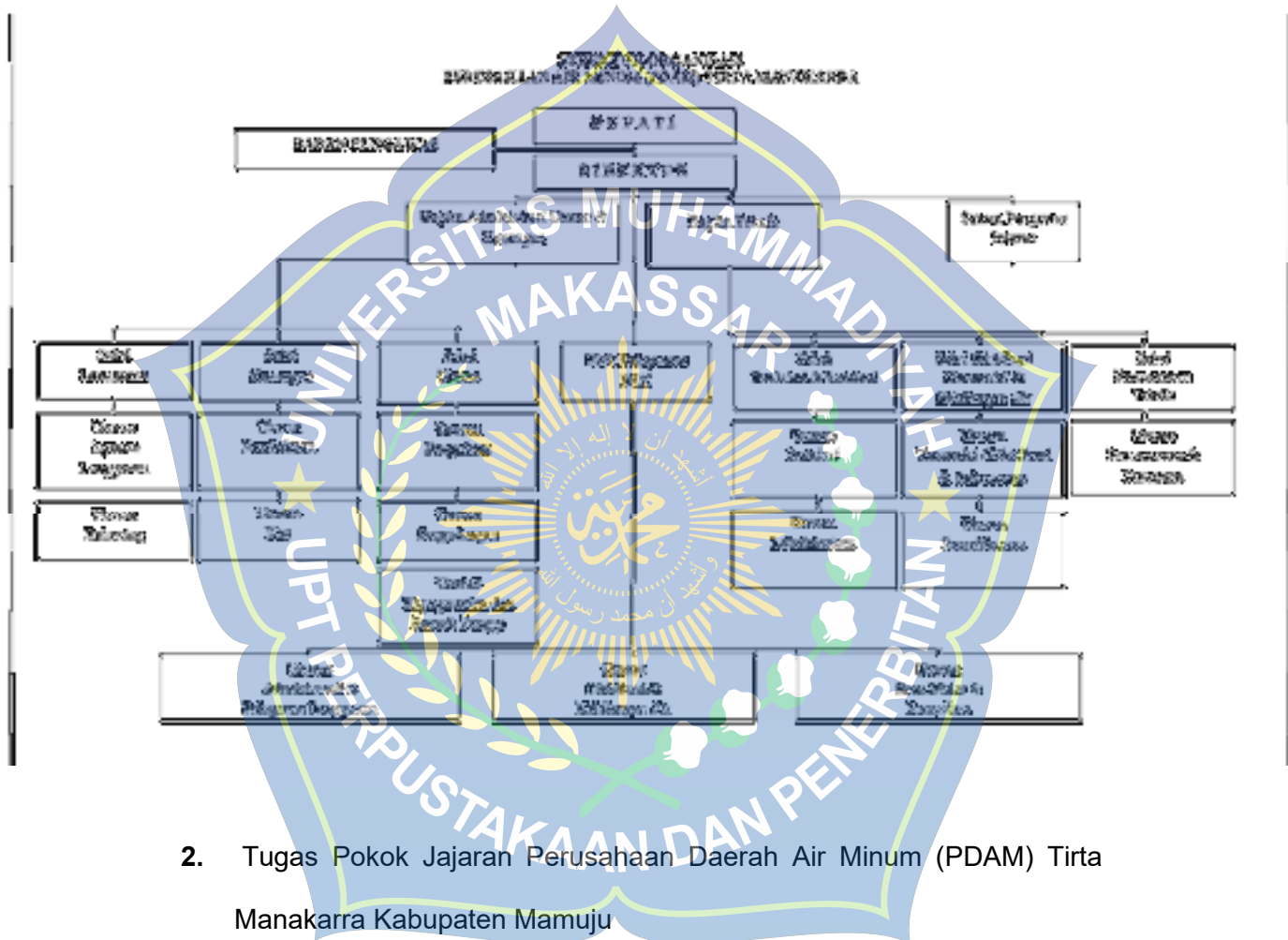
Misi PDAM Tirta Manakarra adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepuasan pelayanan pelanggan;
- b. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya air baku;
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
- e. Mewujudkan terciptanya budaya kerja yang positif dan nyaman.

C. Susunan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jajaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

1. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 struktur organisasi



2. Tugas Pokok Jajaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju

Badan Pengawas mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap Pengurusan dan pengelolaan PDAM – TM.
- mamberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM – TM antara lain Pengangkatan Direktur, rencana perubahan satatus kekayaan PDAM – TM, rencana pinjaman dan ikatan hukum

- dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan PDAM – TM yang dibuat Direktur Kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
 - d. menetapkan Rencana Kerja dan pembagian tugas antara para anggota menurut bidang mereka masing-masing untuk masa 12 (dua belas) bulan berjalan, sesuai dengan Tahun buku PDAM - TM.
 - e. menyelenggarakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi PDAM – TM dan bila mana diperlukan sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat untuk menentukan Keputusan mengenai hal-hal yang mendesak.
 - f. merumuskan Kebijakan PDAM – TM secara terarah dalam bidang penanaman modal / penggunaan dana, pemamfaatan dan pengamana air baku, peningkatan kapasitas produksi air, perluasan maupun rehabilitasi jaringan transmisi air minum sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
 - g. mengadakan penilaian atas prestasi kerja Direktur PDAM – TM atas hasil-hasil yang telah dicapai dan mengusulkan penggantian pengangkatan Direktur baru kepada Bupati.
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan kepada Direktur PDAM – TM berdasarkan kebijakan umum yang telah dirumuskan dalam keputusan rapat Badan Pengawas mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dimaksud.
 - i. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati tentang Rencana kerja Anggaran Tahunan PDAM – TM untuk tahun berikutnya yang diajukan oleh Direktur dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, dan bila tidak dikemukakan keberatan atau

penolakan sampai tahun buku mulai berjalan, maka Anggaran tersebut dianggap sah.

- j. meneliti dan mengevaluasi serta memberi petunjuk lebih lanjut atas laporan Perhitungan Hasil Usaha yang wajib dibuat oleh Direktur setiap jangka 3 (tiga) bulan sekali.
- k. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati tentang Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang diajukan oleh Direktur .
- l. memberi pendapat dan saran kepada Bupati tentang laporan tahunan Perusahaan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi/ laba dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diterima oleh Direktur dan pelaksanaan pembangian laba dilaksanakan setelah ada laporan pemeriksaan dari Instansi yang berwenang.
- m. mengesahkan kebijakan dan menetapkan kedudukan Kepegawaian PDAM – TM dan penghasilan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- n. menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat koordinasi dan keserasian antara PDAM – TM dengan rencana pengembangan usaha dan kegiatan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dibidang perluasan wilayah, termasuk Daerah Pemukiman, Sarana Pelistrikan, Kelestarian alam, Pelebaran Jalan, dan Kebersihan Kota.
- o. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan Tahunan) serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PDAM – TM dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

(1) Direktur mempunyai tugas.

- a. penyusunan rencana kegiatan Anggaran PDAM – TM koordinasi dan pengawasan selutruh kegiatan operasional PDAM – TM.
- b. pembinaan kepegawaian,

- c. mengurus dan pengelolaan kekayaan PDAM – TM.
- d. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan / Corporate Plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Badan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RAKP) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan / Corporate Plan) kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- g. menyampaikan Laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Badan pengawas masing – masing menurut waktu yang ditentukan.
- h. memelihara suasana kerja, kerja sama serta komunikasi timbal balik yang efektif dalam seluruh Organisasi.
- i. memeriksa dan menandatangani voucher cheq dan atas dasar ini menandatangani cheq bersama Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk pembayaran yang dilakukan oleh Kasir.
- j. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM – TM, berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM – TM serta mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur.
- k. mewakili PDAM - TM didalam dan diluar Pengadilan dan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM – TM.
- l. menjual menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM – TM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- m. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dari dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati melalui Pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM – TM.
- n. menetapkan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PDAM – TM dengan persetujuan Badan Pengawas.
- o. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan dan laporan Tahunan PDAM – TM.

(2). Dalam melaksanakan tugas Direktur dibantu oleh:

- a. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- b. Bagian Teknik.
- c. Satuan Pengawas Internal. (SPI).
- d. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan (IKK).

(1). Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan keuangan
- b. Penyiapan bahan – bahan untuk penyusunan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan / Corporate Plan) dan penjabarannya setiap tahun (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP)
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan pendayagunaan pegawai PDAM – TM.
- d. Penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data elektronik, kehumasan dan protokol serta pelayanan pengaduan pelanggan.
- e. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan meliputi pengadaan pencacatan investasi, pengawasan dan pengendalian terhadap asset / barang milik PDAM – TM.
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan Bagian lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Memeriksa dan menandatangani voucher cheq dan atas dasar tersebut menandatangani cheq bersama Direktur untuk pembayaran yang dilaksanakan oleh kasir.
- h. Menandatangani daftar rekening yang diajukan sesegera mungkin secara berkala memeriksa kebenaran perhitungannya.
- i. Mengendalikan penerimaan uang pendapatan hasil penagihan rekening air dari pelanggan,
- j. Penyusunan laporan kegiatan sesuai bidang tugas.

2 . Dalam melaksanakan tugas Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh'

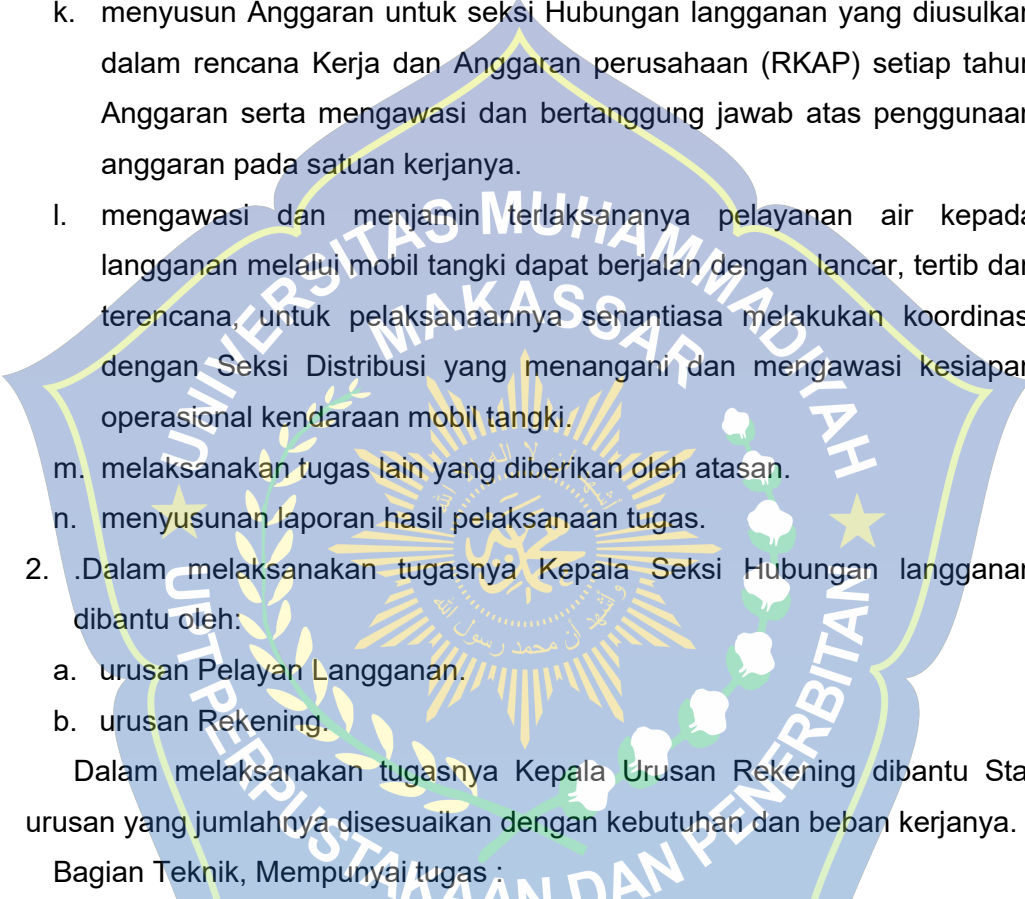
- a. Seksi Umum,

- b. Seksi Hubungan Langganan..
 - c. Seksi Keuangan.
- (1) Seksi Keuangan mempunyai Tugas;
- a. menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. menyiapkan data/bahan penyusunan naskah Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan /Corporate Plan);
 - c. menyusun dan menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business Plan /Corporate Plan);
 - d. mempersiapkan data/bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - e. memeriksa data/bahan penyusunan naskah RKAP dan perubahan RKAP bersama Tim Anggaran PDAM – TM.
 - f. melakukan evaluasi terhadap unsur Rencana Anggaran yang diajukan setiap Unit/satuan kerja PDAM – TM dan mempersiapkan rencana usul RKAP untuk mendapatkan Persetujuan Badan pengawas dan pengesahan Bupati.
 - g. mengadakan perkiraan dan analisa terhadap penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik
 - h. melakukan evaluasi tarif, untuk bahan penetapan dan atau penyesuaian tarif rekening air PDAM – TM.
 - i. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada bawahannya agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, memeriksa voucher cheq yang dipersiapkan oleh Urusan Pembukuan.
 - j. memeriksa kelengkapan dan kekurangan serta kesalahan bukti-bukti pendukungnya seperti nota tagihan langganan/faktur/kwitansi surat pesanan pembelian dan bukti-bukti lainnya.
 - k. mempersiapkan dan mengajukan Voucher cheq pada saat jatuh tempo kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk meminta persetujuan pembayaran.
 - l. meneliti konsep laporan manajemen dan laporan-laporan yang dibuat oleh Urusan Pembukuan.
 - m. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan dan perbelanjaan serta kekayaan perusahaan.

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
1. . Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi keuangan dibantu oleh;
- a. Urusan Pembukuan.
 - b. Urusan Kas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Kas dibantu staf urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

1. Seksi Hubungan Langgan mempunyai tugas.;
- a. menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan yang berhubungan langganan yang dilaksanakan bawahannya yaitu, Urusan Layanan Langgan Urusan Rekening, Staf Pembaca Meter dan Staf penagihan
 - c. memelihara komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Seksi-Seksi lain dan membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam mengembangkan sistem layanan langganan.
 - d. mempersiapkan Naskah – naskah surat yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan maupun masyarakat serta, penjelasan tentang kebijakan PDAM – TM.
 - e. menyiapkan bahan – bahan untuk informasi mengenai pengembangan PDAM – TM maupun penetapan tarif air minum dan sambungan baru melalui media cetak dan elektronik dengan data-data informasi yang benar serta distribusi bahan – bahan untuk pemberitaan melalui media cetak maupun elektronik
 - f. menjamin agar pelaksanaan sistem administrasi, pelaporan dan pengarsipan dari seluruh urusan dibawahnya dapat dilaksanakan dengan baik.
 - g. menjamin kelancaran dan pengembangan pelayanan langganan, pengaduan langganan, jadwal pembacaan meter air serta jadwal pembuatan rekening air dan Kehumasan.
 - h. menjamin prosedur Pelayanan Langgan pengakuan sanksi denda atas pelanggaran dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

- 
- i. menjamin agar setiap langganan mengetahui pembacaan/pencacatan pemakaian air setiap bulan secara tertib, tepat waktu serta stand/angka meter yang sebenarnya.
 - j. menjamin kelancaran dan kebenaran pembuatan rekening air dan pencatatannya, dalam daftar rekening yang akan ditagih.
 - k. menyusun Anggaran untuk seksi Hubungan langganan yang diusulkan dalam rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) setiap tahun Anggaran serta mengawasi dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada satuan kerjanya.
 - l. mengawasi dan menjamin terlaksananya pelayanan air kepada langganan melalui mobil tangki dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terencana, untuk pelaksanaannya senantiasa melakukan koordinasi dengan Seksi Distribusi yang menangani dan mengawasi kesiapan operasional kendaraan mobil tangki.
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
2. .Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Hubungan langganan dibantu oleh:
- a. urusan Pelayan Langganan.
 - b. urusan Rekening.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Rekening dibantu Staf urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerjanya.

1. Bagian Teknik, Mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi bidang perencanaan teknik, produksi dan instalasi, pemeliharaan serta pengendalian kehilangan air.
 - b. pengkajian secara berkala terhadap Business Plan dan Corporate Plan perusahaan dan perumusan strategi perusahaan serta kegiatan penelitian dan pengembangan perusahaan.
 - c. penyiapan dan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan tenaga teknik.
 - d. pengkoordinasian dan pengendalian sumber air baku, instalasi / meter produksi dan system distribusi.
 - e. pengkoordinasian kegiatan – kegiatan pengujian peralatan teknik bahan – bahan kimia.
 - f. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan mengenai peningkatan hasil produksi, distribusi dan operasional teknik lainnya.

- g. pelaksanaan Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas (3K) pelayanan air kepada pelanggan.
 - h. penyusunan rencana dan penyiapan data kehilangan air pada jaringan distribusi.
 - i. pengendalian dan pengawasan kehilangan air pada jaringan distribusi.
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan direktur lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - k. penyusunan laporan kegiatan sesuai bidang tugas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Bidang Teknik dibantu oleh :
1. Seksi Perencanaan Teknik.
 2. Seksi Produksi dan Instalasi.
 3. Seksi Distribusi dan Kehilangan Air.

Dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Urusan dibantu oleh Staf Urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja

1. Urusan Laboratorium Mempunyai Tugas :
- a. menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. melakukan Penelitian laboratorium secara terus menerus (periodik) terhadap kualitas air bersih dan air baku pada instalasi produksi.
 - c. menentukan dan mengawasi dosis penggunaan masing-masing jenis bahan kimia berdasarkan tingkat kualitas air.
 - d. melaksanakan pengendalian kualitas air bersih pada jaringan distribusi
 - e. mengadakan penelitian laboratorium kualitas air bersih dari instalasi serta membantu penelitian laboratorium kualitas air bagi masyarakat.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Laboratorium dibantu Staf urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerjanya.

1. Seksi Transmisi/Distribusi dan Kehilangan Air mempunyai tugas :
- a. penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. pengkoordinasian penggunaan dan pemanfaatan air pada jaringan distribusi (jaringan primer dan sekunder) serta pemasangan sambungan baru.
 - c. penyiapan program pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi, pemeriksaan dan penggantian meter air induk, meter air dan booster secara berkala.
 - d. penyiapan bahan dan rencana pengadaan persediaan Meter Air.
 - e. penyelenggaraan administrasi Meter Air dan penyelenggaraan administrasi kehilangan air.
 - f. penyelenggaraan administrasi penyediaan air bersih untuk pelayanan sosial / Corporate Social Responsibility (CSR).

- g. pengkoordinasian analisa kerja meter air dan booster pompa.
- h. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian meter dan suplay air.
- i. pengkoordinasian pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan dan pemanfaatan air secara illegal (sambungan illegal).
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Transmisi/Distribusi dan Kehilangan Air dibantu oleh :

- a. Urusan Transmisi/Distribusi dan Kebocoran
 - b. Urusan Pemeliharaan.
2. Urusan Kebocoran Air dan Pelayanan Sosial, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Mengatur sistem operasi pemeliharaan/kontrol terhadap jaringan pipa distribusi.
 - c. Melakukan pendeteksian dan penanggulangan kebocoran atau kerusakan
 - d. Melaksanakan pencatatan dan inventaris terhadap kebocoran air dan jenis kehilangan air untuk kepentingan pelayanan kebutuhan Air PDAM – TM dan selanjutnya jumlah kebocoran / kehilangan air dilakukan konversi dengan nilai nominal.
 - e. Melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis terhadap pelaksanaan pengendalian kebocoran air dan pelayanan sosial kebutuhan air sebagai bahan penyusunan RKAP. PDAM – TM.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - g. Menyusun laporan.
3. Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - b. melaksanakan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi, meter air, booster pompa dan valve serta alat bantu lainnya secara berkala.
 - c. melakukan penggantian peralatan dan alat bantu, meter air rutin, non rutin dan pemasangan segel meter air serta membuat riwayat meter air.
 - d. melakukan pembuatan, pemeliharaan dan penggantian bak meter air.
 - e. mengadakan perbaikan seluruh sistem pendistribusian air pada area pelayanan.
 - f. mengatur sistem operasi pemeliharaan / kontrol terhadap jaringan pipa distribusi.
 - g. melaksanakan pendeteksian dan penanggulangan kebocoran atau kerusakan.
 - h. melaksanakan pencatatan dan inventaris terhadap kebocoran air dan jenis- jenis kehilangan air untuk kepentingan pelayanan kebutuhan air PDAM dan selanjutnya jumlah kebocoran/ kehilangan air dilakukan konversi dengan nilai nominal.
 - i. melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis terhadap pelaksanaan pengendalian kebocoran air dan pelayanan sosial kebutuhan air sebagai bahan penyusunan RKAP PDAM – TM.

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan Pemeliharaan dibantu Staf urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerjanya

D. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu system yang membandingkan rencana (anggaran) dengan tindakan (hasil sesungguhnya) dari setiap pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang atau kegiatan perusahaan dan atau suatu departemen dalam pencapaian tujuan perusahaan

PDAM Tirta Manakarra Kabupaten Mamuju merupakan salah satu perusahaan yang telah menetapkan akuntansi pertanggungjawaban hal ini seperti yang dijelaskan oleh seksi umum Bapak Anwar Kasim bahwa

“Sebagaimana biasanya dalam perusahaan itu harus mempunyai sistem akuntansi pertanggungjawaban terhadap kegiatan atau oprasional selama baik itu perperiode, perbulan, persemester maupun pertahun. Jadi memang PDAM mamuju itu punya sistem akuntansi untuk prtanggungjawaban karna disetiap periode akuntansi kita selalu dilakukan di audit baik itu audit internal, audit eksternal salah satunya kap bpk dan juga bpkp jadi memang PDAM itu harus punya sistem akuntansi pertanggungjawaban”

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pdam mamuju sudah diterapkan sejak berdirinya PDAM kabupaten mamuju. Hal tersebut dijelaskan oleh seksi umum Bapak Anwar Kasim bahwa :

“Sejak berdirinya, sejak berdirinya sebagai perusahaan milik daerah PDAM sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban menejmen terhadap pengelolaan kepada pemilik dalam hal ini bupati mamuju selaku pemilik.”

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk mengajak karyawan dapat melakukan tugas dan wewenang dengan benar serta dapat bertanggungjawab atas peyimpangan biaya maupun penghasilan (pendapatan perusahaan. Hal ini dijelaskan seksi umum Bapak Anwar Kasim bahwa:

“Salah satunya transparansi kepada stakeholder salah satunya pemilik dan juga mitra-mitra kita supaya semua oprasional dan juga pengelolaan PDAM itu bisa diakses bisa di monitorin oleh pihak-pihak luar eksternal yg salah satunya itu transparansi kepada pemilik jadi memang tujunnya kita menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban bisa transparan kepada stekolder seluruhnya.”

Dapat disimpulkan bahwa PDAM tirta manakarra sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sejak berdirinya sebagai transparansi kepada stakeholder.

2. Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi pertanggungjawaban

a. Struktur Organisasi

Terdapatnya struktur organisasi yang baik akan membantu tiap-tiap pusat pertanggungjawaban mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya dalam perusahaan. Struktur organisasi yang baik dapat dikatakan sebagai struktur organisasi yang menggambarkan dengan jelas baik tugas, wewenang maupun tanggung jawab setiap bagian atau unit-unit organisasi yang ada dalam perusahaan. Diharapkan dengan adanya batasan- batasan tersebut maka tidak terjadi adanya tanggung jawab ganda dalam pengerjaan tugas sehingga semua bagian dapat lebih fokus dalam mengendalikan pekerjaannya. Agar sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan maka sistem tersebut hendaknya didasarkan pada pengetahuan tentang struktur organisasi yang

disusun berdasarkan penentuan kekuasaan atas pembagian kerja, tanggung jawab, spesialisasi dan pelimpahan wewenang.

Struktur organisasi yang ditetapkan pada PDAM tirta manakarra sudah cukup baik karena telah menunjukkan aliran pertanggungjawaban dari pimpinan paling atas ke pimpinan paling bawah serta terdapat pembagian tugas maupun pemisahan fungsi secara tegas dan jelas. Dengan adanya pemisahan ini dapat membantu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban bagi tiap-tiap bagian, akan tetapi pada PDAM Tirta Manakarra Internasional pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi tanggung jawab penuh bagian keuangan tentunya dibantu oleh bagian-bagian lain yang terkait. Adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang semakin besar pada tingkatan manajemen yang lebih rendah melalui jenjang organisasi menunjukkan bahwa PDAM Tirta Manakarra telah menerapkan sistem desentralisasi.

Hal tersebut disampaikan oleh seksi umum Bapak Anwar Kasim bahwa:

“Struktur organisasi menjelaskan bahwasanya garis komando dari setiap bidang itu ada, jadi akuntansi pertanggungjaaban itu berkaitan masalah topoksi dari pada karyawan masing-masing bidang jadi misalnya si A kita langsung tau bahwa topoksiya seperti apa jadi kita bisa komplek atau kita bisa liat dengan akuntansi pertanggungjawan seperti apa, karna didalam akuntansi pertanggungjawaban ada SOP, SOP kita itu kita jalankan berdasarkan topoksi masing-masing jadi sangat-sangat berkaitan erat antara struktur organisasi di perusahaan dengan akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri.”

Dapat disimpulkan bahwa PDAM tirta manakarra mempunyai struktur organisasi untuk menjelaskan tugas dan wewenang setiap sub bidang.

b. Klasifikasi Biaya dan Kode Rekening Biaya

Pengklasifikasian biaya ke dalam biaya terkendali dan tidak terkendali sangat ditekankan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban karena pengendalian dan penggunaan tanggung jawab yang baik terhadap biaya-biaya yang dapat dikendalikan dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja suatu pusat pertanggungjawaban. Pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali juga sangat penting untuk menetapkan pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan dari suatu anggaran. Manajemen dapat mengetahui dimana biaya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab atas realisasi dan penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap suatu anggaran.

Klasifikasi biaya yang dilakukan PDAM Tirta Manakarra memenuhi konsep akuntansi pertanggungjawaban, karena terdapat klasifikasi atas kode rekening biaya secara rinci pada laporan pertanggungjawaban biaya. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, hal ini akan memudahkan manajemen menelusuri siapa yang bertanggung jawab bila terjadi penyimpangan anggaran. Dalam akuntansi pertanggungjawaban juga dibutuhkan adanya Pengkodean yang jelas terhadap rekening biaya. Karena pemberian kode rekening juga mendukung klasifikasi biaya yang berfungsi memudahkan dalam penelusuran terhadap manajemen yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan biaya. Penggunaan kode rekening akan menunjukkan jenis biaya dan tempat biaya sehingga mempercepat pemberian informasi penyajian data keuangan. Setiap tingkatan manajemen hendaknya memiliki kode rekening agar mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian biaya.

Hal ini dijelaskan oleh Seksi Keuangan Bapak Sarman, SE bahwa:

“Setiap penyusunan anggaran ada kode rekening untuk memudahkan dalam memudahkan manajemen dalam menelusuri apabila terjadi penyimpangan”

Dapat disimpulkan bahwa PDAM tirta manakarra menggunakan kode rekening dalam setiap penyusunan anggaran untuk memudahkan dalam setiap penggunaan anggaran yang digunakan.

c. Anggaran

Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja sama halnya dengan anggaran, anggaran digunakan sebagai pedoman kerja yang mempunyai tujuan untuk membantu dalam kegiatan pengendalian yang pada akhirnya juga akan memudahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh seksi keuangan Bapak Sarman, SE bahwa:

“Sangat penting karna didalam anggaran itu kita tuangkan proyeksi-proyeksi hal-hal apa yg ingin kita capai kedepannya, misalnya 1 tahun kita menyusun anggaran untuk 1 tahun apa yg ingin kita capai di tahun tersebut, misalnya ada target-target pendapatan harus tercapai, penerimaan harus maksimal, kemudian biaya harus memenuhi. jadi sangat penting unuk membuat anggaran karna itu merupakan sebuah pedoman kita selama satu tahun kedepan, bahwa misalnya utuk biaya di bidang tersebut kita anggarkan beberapa anggaran kita bisa evaluasi, misalnya realisasinya seperti melebihi anggaran apa penyebabnya? Kenapa bisa melebihi? Jadi kita bisa menjadikan pedoman sehingga sangat penting untuk penyusunan anggaran.”

Pada penyusunannya direksi yang bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran hal tersebut disampaikan oleh seksi keuangan Bapak Sarman, SE bahwa:

“Yg bertanggungjawab didalam penyusunan anggaran adalah direksi, biasanya disini kita menganut sistem batenup dipadukan dengan

topdown sistem artinya semua kita libatkan didalam penyusunan anggaran supaya betul-betul menggambarkan atau mencerminkan keinginan-keinginan seluruh dari pada menejmen yg ada jadi kita menggabungkan antara topdown sistem dengan batenuip sistem.jadi yg bertanggungjawab penyusunan anggaran itu direksi selaku penanggungjawab penuh tapi dia menunjuk misalnya ada tim yg dibentuk untuk menyusun anggaran tersebut.”

Pada PDAM Tirta Manakarra penyusunan anggaran biaya dilakukan dengan menggunakan Bottom up budgetting. Tujuan disusunnya anggaran ini adalah untuk mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan tiap bagian dalam membiayai seluruh kegiatan operasional yang akan dilaksanakan dan mencegah adanya penyimpangan terhadap penggunaan dana perusahaan. Anggaran merupakan alat bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan sasaran perusahaan ke seluruh tingkatan manajemen, untuk itu koordinasi dan partisipasi dari seluruh tingkatan manajemen sangat dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Dalam hal ini, fungsi manajer beberapa bagian yang ada pada PDAM Tirta Manakarra sebagai pusat pertanggungjawaban bagi manajemennya terlaksana sepenuhnya oleh semua manajer karena proses penyusunan anggaran sebagai bentuk dari partisipasi semua staff sesuai bagiannya dijalankan dengan baik kemudian direksi akan bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran tersebut.

Pada penyusunan anggaran PDAM Tirta Manakarra terdapat proses yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh seksi keuangan Bapak Sarman, SE bahwa:

“Prosesnya dimulai dengan mengadakan rapat pembahasan pada semua unsur yg terkait, melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran serta analisa kebutuhan anggaran setiap bagian untuk setahun mendatang”

Dalam menetapkan anggarannya perusahaan sepenuhnya melibatkan seluruh staff atau seksi pusat pertanggungjawaban dari tiap bagian dengan membentuk tim pada penyusunan anggaran tersebut. Hendaknya seluruh pusat pertanggungjawaban ikut dilibatkan dalam penetapan anggaran untuk bagian yang terkait karena dengan adanya partisipasi tiap manajer bagian dalam penetapan anggaran akan lebih memotivasi para manajer pusat pertanggungjawaban mencapai tingkat anggaran yang telah disepakati dan mereka lebih bertanggungjawab atas apa yang telah ditetapkannya tersebut.



NO.	Uraian	Proyeksi		Realisasi Tahun 2021
		Tahun 2022	Tahun 2021	
I	Proyeksi Penerimaan Kas			
1	Penerimaan Kas	23.484.882.850	18.271.331.615	17.154.131.615
2	Penerimaan Non Operasi	4.000.000.000		117.200.000
	Jumlah Penerimaan Kas	27.484.882.850	18.271.331.615	17.271.331.615
II	Proyeksi Pengeluaran Kas			
1	Pengeluaran Operasi	17.653.184.648	14.731.179.677	14.731.179.677
2	Pengeluaran Non Operasi	8.139.898.595	4.937.175.138	4.937.175.138
	Jumlah Pengeluaran Kas	25.793.083.243	19.668.354.815	19.668.354.815
III	Kenaikan/Penurunan	1.691.799.606	(1.397.023.200)	(1.397.023.200)
IV	Saldo Awal Kas	605.599.441	2.002.622.641	2.002.622.641
V	Saldo Akhir Kas	2.297.399.048	605.599.441	605.599.441

d. Laporan Akuntansi Pertanggungjawaban

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dikehendaki adanya sistem pelaporan biaya oleh pusat pertanggungjawaban oleh karena itu adanya laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Laporan ini nantinya akan dijadikan dasar bagi manajemen tingkat yang lebih tinggi untuk menilai kinerja masing-masing manajer menengah dan manajer bawah.

Laporan pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun secara periodik atau tergantung pada kebijakan perusahaan dan lebih terarah pada kemampuan manajer dalam mengendalikan biaya sesuai dengan wewenang dan tingkatan manajemen dalam rangka penilaian kinerja. Laporan pertanggungjawaban biaya harus dengan jelas membedakan antara biaya terkendali dan tidak terkendali karena penilaian kinerja dapat didasarkan atas biaya yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban, selain itu perlu dicantumkan kode rekening untuk bisa menjelaskan tempat terjadinya biaya.

PDAM Tirta Manakarra membuat laporan pertanggungjawabannya tiap tahun sekali yang dibuat secara rinci oleh manajer keuangan. Manajer tiap bagian wajib menyerahkan bukti-bukti pembayaran atau penggunaan dana perusahaan untuk aktivitas perusahaan kepada manajer Keuangan kemudian manajer keuangan akan membukukannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban per tahun untuk diserahkan kepada Direktur perusahaan sebagai pedoman untuk menilai kinerja tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Untuk bagian Teknik dan penelitian pengembangan dan sub bagian dibawahnya wajib membuat laporan pertanggungjawaban dari pelayanan yang sedang dikerjakannya dan hasil realisasi dari anggaran biaya yang telah ditentukan sesuai kontrak dalam bentuk RAB (Rincian Anggaran Biaya). Tidak hanya sampai disitu, para manajer teknik yang berkepentingan dalam pengerjaan suatu kegiatan juga harus membuat laporan prosentase seberapa jauh pengerjaan yang sedang dikerjakan

tersebut sudah berjalan sebagai bukti pertanggungjawabannya kepada Direktur perusahaan.

Hal tersebut dijelaskan oleh seksi keuangan Bapak Sarman, SE bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban dibuat tiap tahun sebagai penilaian kinerja setiap sub bidang, kemudian diserahkan kepada direktur perusahaan”

Dapat disimpulkan bahwa PDAM tirta manakarra membuat laporan pertanggungjawaban tiap tahun kemudian diserahkan kepada direktur perusahaan, laporan tiap tahun tersebut juga digunakan sebagai penilaian kinerja setiap sub bidang PDAM tirta manakarra.

e. Penilaian Kinerja

Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dikehendaki adanya sistem pelaporan biaya oleh pusat pertanggungjawaban oleh karena itu adanya laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Laporan ini nantinya akan dijadikan dasar bagi manajemen tingkat yang lebih tinggi untuk menilai kinerja masing-masing manajer menengah dan manajer bawah. Laporan pertanggungjawaban dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun secara periodik atau tergantung pada kebijakan perusahaan dan lebih terarah pada kemampuan manajer dalam mengendalikan biaya sesuai dengan wewenang dan tingkatan manajemen dalam rangka penilaian kinerja. Laporan pertanggungjawaban biaya harus dengan jelas membedakan antara biaya terkendai dan tidak terkendali karena penilaian kinerja dapat didasarkan atas biaya yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban, selain itu

perlu dicantumkan kode rekening untuk bisa menjelaskan tempat terjadinya biaya.

Laporan pertanggungjawaban sangat penting dalam menilai kinerja perusahaan. Hal tersebut disampaikan oleh seksi umum Bapak Anwar Kasim bahwa:

“Sangat bermanfaat, karena kita bisa memberikan tolak ukur terhadap seluruh manajemen dan juga karyawan kita punya tolak ukur bahwasanya di dalam pengelolaan itu kita harus betul-betul menjalankan tugas masing-masing jadi ada rambu-rambu yang membatasi kita untuk melakukan pekerjaan operasional kita disini sehingga ini kita anggap akuntansi itu sangat bermanfaat bagi perusahaan”.

Setiap pusat pertanggungjawaban menetapkan target-target operasional dan anggaran. Kemudian dibuat perbandingan realisasi dengan anggaran tersebut untuk melihat apakah pengendalian biaya telah berjalan dengan baik. Selain itu, ditentukan ukuran kinerja secara nonfinansial berupa Standar Operasional Perusahaan (SOP) serta tugas dan tanggung jawab divisi untuk mengendalikan kerja karyawan agar terarah dan meminimalisir kesalahan ketika bekerja. PDAM tirta Manakarra. Hal tersebut disampaikan oleh seksi umum Bapak Anwar Kasim bahwa :

“Sejauh ini iya, karena setiap bidang ada namanya SOP, jadi setiap bidang itu kita punya SOP kita turunkan menjadi uraian atau beban kerja makanya mereka memang sangat paham apa hak dan kewajibannya seorang pegawai sehingga di uraian kerja itu dia bisa mengetahui ini beban kerjanya saya, ini tugas saya jadi sangat-sangat diketahui karena adanya SOP itu bahwa misalnya bidang ini pekerjaan ini SOP nya seperti ini yang bertanggungjawab ini ini ini seperti itu.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh seksi langganan Bapak Sugan Riyadi bahwa :

“Klo SOP itu berjalan sesuai dengan topoksi masing-masing karna SOP itu lahir dari setiap bidang misalnya uraian kerjanya si A si B itu kita buatkan SOP bahwasanya standar oprasionalnya kita didalam melakukan pekerjaan misalnya dibagian keuangan untuk pelaporan ada standarnya tersendiri sehingga yg terlibat didalam penyusunan SOP ya dibidang itu sendiri jadi secara keseluruhan itu semua bidang yg terlibat karna yg tau masalah bidangnya ya bidang ituu sendiri yg bisa melahirkan SOP dan juga uraian kerja. “

Hal tersebut juga disampaikan oleh seksi umum Bapak Anwar Kasim bahwa :

“Iyya, kita secara mandiri melakukan evaluasi kinerja namun disisi eksternalnya kita setiap tahunnya diaudit kinerja oleh bpkp yg dimana disitu akan menggambarkan sejauh mana menejmen mengelolah apakah benar-benar mempunyai kinerja yg baik dan juga biasanya kita di internal melakukan penilaian kinerja mandiri terhadap setiap karyawan, jadi kita bisa merumuskan bahwasanya misalnya si A seperti ini si B seperti ini seperi itu tapi secara keseluruhan perusahaan itu dinilai langsung oleh bpkp selaku auditor independen yg membidangi untuk masalah kinerja perusahaan.”

Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi secara finansial dilakukan tiap bulan dengan membandingkan realisasi dengan anggaran biaya. Selain itu evaluasi kinerja pada PDAM Tirta Manakkara Mamuju dilakukan oleh BPKP. Evaluasi kinerja ini dilakukan PDAM tirta manakarra Kabupaten Mamuju guna untuk menilai sejauh mana manajemen menjalankan tugasnya.

E. Pembahasan

Penerapan laporan pertanggungjawaban pada PDAM Tirta Manakkara Mamuju sudah sesuai dengan konsep laporan akuntansi pertanggungjawaban yang benar. Karena selain belum adanya pengklasifikasian kode rekening menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali, pembuatan laporan akuntansi pertanggungjawabannya dilakukan sepenuhnya oleh manajer tiap bagian sehingga tanggung jawab dalam

penyusunan laporan pertanggungjawaban semua bagian ikut merasakan. Hal ini sesuai dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban untuk menghindari terjadinya penyimpangan karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap apa yang seharusnya menjadi tugas masing-masing pusat pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat selain harus memuat anggaran, realisasi dan selisih juga harus memuat kode rekening, hal ini dilakukan karena selain sesuai sistem akuntansi pertanggungjawaban juga memudahkan dalam penilaian kinerja tiap bagian. Kelebihan pdam tirta manakarra kabupaten mamuju bisa memberikan tolak ukur terhadap manajemen dan bisa transparansi kepada stekolder.

“Laporan pertanggungjawaban yang belum menerapkan kualifikasi biaya menjadi terkendali dan tidak terkendali membuat sulitnya proses pengendalian dan penilaian kinerja. Dengan demikian, elemen-elemen akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh perusahaan belum dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja yang memadai. Penilaian kinerja keuangan atau anggaran pusat pertanggungjawaban menggunakan tolak ukur bahwa suatu bagian dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila mampu menggunakan atau merealisasikan anggaran sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja akan menjadi dasar bagi pihak manajemen dalam memberikan tindakan selanjutnya berupa pemberian imbalan. Perusahaan juga memberikan imbalan atau reward yang disertai dengan kinerja karyawan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Seperti pada bagian penagihan apabila manajer dapat mencapai target akan ada reward atau hadiah tersendiri atas kinerja tersebut”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, (2021) Menunjukkan Bahwa Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng. Positif Memiliki Arti Bahwa Perubahan Kinerja Manajerial Searah Dengan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban. Sehingga, Semakin Tinggi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Maka Semakin Meningkatkan Pula Kinerja Manajerialnya, Begitu Pula Sebaliknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PDAM Tirta Manakkara Mamuju sudah cukup memadai

Struktur organisasi yang ditetapkan pada PDAM Tirta Manakkara sudah baik karena telah menunjukkan pusat pertanggungjawaban dari pimpinan paling atas ke pimpinan paling bawah serta terdapat pembagian tugas maupun pemisahan fungsi secara tegas dan jelas. Baik tugas, wewenang dan pelaporan menjelaskan hubungan vertikal yang ada dalam perusahaan, terdapat pula hubungan horizontal yang mana ditunjukkan dengan adanya koordinasi dari bagian satu dengan lainnya. Klasifikasi biaya dan kode rekening biaya yang dilakukan PDAM Tirta Manakkara belum dapat memenuhi konsep akuntansi pertanggungjawaban secara sempurna biaya tersebut termasuk ke dalam biaya terkendali atau tidak terkendali.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti tidak membahas secara mendalam tentang Akuntansi Pertanggungjawaban dalam pengendalian biaya maka dari itu peneliti selanjutnya diharapkan membahas Akuntansi Pertanggungjawaban khususnya pengaruh SDM terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Meirina, Aziora Pengaruh Partisipan Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pdam Kota Padang. *Jurnal Pundi*, Vol. 04, No. 02, Juli 2020. Hal 157-170.
- Desi Triana Munthe 2019, Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Pusat Pertanggungjawaban Biaya Pada Pdam Tirtanadi Di Sumatera Utara. Tesis.
- Tarmizi, Selvyana, Purnomo, 2010. Pengendalian Biaya Dalam Hubungannya Dengan Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus Pada Hotel Indra Puri Di Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 1, No. 1. Halaman 95 – 108.
- Sicylia Aliu, 2013. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Dan Penilaian Kinerja. *Jurnal Emba*. Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 160-168.
- Ardiani, Wirasedana, 2013. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.3 (2013):561-573.
- Anggun Putri Anik, 2013. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi. *Jurnal Emba*. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1667-1676.
- Ega Mawarni Alfitasari, 2022. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menilai Kinerja Pusat Biaya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar. Skripsi.
- Nur Azizah, 2021. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajeri Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Bantaeng. Skripsi.
- Rifky Ronald Tumbuan, 2013, Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. *Jurnal Emba*, Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 314-325.
- Olivia Sicilia Prang, Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Untuk Penilaian Kinerja Pada Pt. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Bitung. *Jurnal Emba*, Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1016-1024.
- Yogi Setiyo Langgeng, 2014. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 6 (2014).

Asmita Ramadanti,2019. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Hotel Di Kota Makassar.Skripsi.

Sinar Santriwati,2022. Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat Laba Pada Pdam Tirta Sinjai Bersatu.Skripsi.

Hasna, Rachman,2020. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada Pt. Taspen (Persero) Kc Bogor.*Jurnl Ilmah Akuntans*.Vol.08 No.1i





Lampiran 1. Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Coding
1.	Apakah PDAM Tirta manakarran menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban?	SU
2.	Sejak kapan PDAM Tirta manakarran menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban?	SU
3.	Apa tujuan yang ingin dicapai PDAM Tirta manakarran dalam menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban?	SU
4.	Apakah perusahaan PDAM tirta manakarra melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus?	SU
5.	Apakah akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk penilaian kinerja perusahaan?	SU
6.	Apa Hubungan Struktur Organisasi dengan pusat pertanggungjawaban?	SU
7.	Apakah dalam penyusunan anggaran ada kode rekening?	SU
8.	Siapa yang memiliki tanggung jawab menyusun anggaran perusahaan?	SU,SK

9.	Apakah Penyusunan Anggaran pada PDAM Tirta Manakarra itu penting?	SK
10.	Bagaimana proses penyusunan anggaran?	SK
11.	Bagaimana SOP Perusahaan mengenai system pelaporan terhadap pimpinan dan siapa saja terlibat dalam penyusunan SOP?	SL

Lampiran 2 Jawaban

No.	Coding	Jawaban
1.	SU	Sebagaimana biasanya dalam perusahaan itu harus mempunyai sistem akuntansi pertanggungjawaban terhadap kegiatan atau oprasional selama baik itu perperiode, perbulan, persemester maupun pertahun. Jadi memang PDAM mamuju itu punya sistem akuntansi untuk prtanggungjawaban karna disetiap periode akuntansi kita selalu dilakukan di audit baik itu audit internal, audit eksternal salah satunya kap bpk dan juga bpkp jadi memang PDAM itu harus punya sistem akuntansi pertanggungjawaban
2.	SU	Sejak berdirinya, sejak berdirinya sebagai perusahaan milik daerah PDAM sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pertanggungjawaban menejmen terhadap pengelolaan kepada pemilk dalam hal ini bupati mamuju selaku pemilik

3.	SU	Salah satunya transparansi kepada stekolder salah satunya pemilik dan juga mitra-mitra kita supaya semua oprasional dan juga pengelolaan PDAM itu bisa diakses bisa di monitorin oleh pihak-pihak luar eksternal yg salah satunya tadi itu transparansi kepada pemilik jadi memang tujunnya kita menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban bisa transparan kepada stekolder seluruhnya.
4.	SU	Iyya, kita secara mandiri melakukan evaluasi kinerja namun disisi eksternalnya kita setiap tahunnya diaudit kinerja oleh bpkp yg dimana disitu akan menggambarkan sejauh mana menejmen mengelolah apakah benar-benar mempunyai kinerja yg baik dan juga biasanya kita di internal melakukan penilaian kinerja mandiri terhadap setiap karyawan, jadi kita bisa merumuskan bahwasanya misalnya si A seperti ini si B seperti ini seperi itu tapi secara keseluruhan perusahaan itu dinilai langsung oleh bpkp selaku auditor independen yg membidangi untuk masalah kinerja perusahaan.
5.	SU	Sangat bermanfaat, karna kita bisa meberikan tolak ukur terhadap seluruh menejmen dan juga karyawan kita punya tolak ukur bahwasanya di dalam pengelolaan itu kita harus seperti ini seperti itu jadi ada rambu-rambu yg membatasi kita untuk melkukan pekerjaan oprasional kita disini sehingga ini kita anggap akuntansi itu sangat bermanfaat bagi perusahaan.
6.	SU	Struktur organisasi disitukan menjelaskan bahwasanya garis komando dari setiap bidang itu ada, jadi akuntansi pertanggungjaaban itu berkaitan masaalah topoksi dari

		<p>pada karyawan masing-masing bidang jadi misalnya si A kita langsung tau bahwa topoksinya seperti ini jadi kita bisa komplek atau kita bisa anukan dengan akuntansi pertanggungjawaban seperti apa, karna didalam akuntansi pertanggungjawaban ada SOP, SOP kita itu kita jalankan berdasarkan topoksi masing-masing jadi sangat-sangat berkaitan erat antara struktur organisasi di perusahaan dengan akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri.</p>
7.	SU	<p>Setiap penyusunan anggaran ada kode rekening untuk memudahkan dalam memudahkan manajemen dalam menelusuri apabila terjadi penyimpangan</p>
8.	SU	<p>Yg bertanggungjawab didalam penyusunan anggaran adalah direksi, cuman kita biasanya disini kita menganut sistem batenup dipadukan dengan topdown sistem artinya semua kita libatkan didalam penyusunan aggaan supaya betul-betul menggambarkan atau mencerminkan keinginan-keinginan seluruh dari pada menejmen yg ada jadi kita menggabungkan antara topdown sistem dengan batenup sistem.jadi yg bertanggungjawab penyusunan anggaran itu direksi selaku penanggungjawab penuh tapi dia menunjuk misalnya ada tim yg dibentuk untuk menyusun anggaran tersebut.</p>
	SK	<p>Yg bertanggungjawab didalam penyusunan anggaran adalah direksi, cuman kita biasanya disini kita menganut sistem batenup dipadukan dengan topdown sistem artinya semua kita libatkan didalam penyusunan aggaan supaya betul-betul menggambarkan atau mencerminkan keinginan-keinginan seluruh dari pada menejmen yg ada</p>

		jadi kita menggabungkan antara topdown sistem dengan batenuip sistem.jadi yg bertanggungjawab penyusunan anggaran itu direksi selaku penanggungjawab penuh tapi dia menunjuk misalnya ada tim yg dibentuk untuk menyusun anggaran tersebut.
9.	SK	Sangat penting karna didalam anggaran itu kita tuangkan proyeksi-proyeksi hal-hal apa yg ingin kita capai kedepannya, misalnya 1 tahun kita menyusun anggaran untuk 1 tahun apa yg ingin kita capai di tahun tersebut, misalnya ada target-target pendapatan harus segini, penerimaan harus segini, kemudian biaya harus seperti ini.jadi sangat penting untuk membuat anggaran karna itu merupakan sebuah pedoman kita selama satu tahun kedepan, bahwa misalnya untuk biaya di bidang ini kita anggarkan segini kita bisa evaluasi, misalnya realisasinya seperti ini melebihi anggaran apa penyebabnya? Kenapa bisa melebihi? Jadi kita bisa menjadikan pedoman sehingga sangat penting untuk penyusunan anggaran.
10.	SK	Prosesnya dimulai dengan mengadakan rapat pembahasan pada semua unsur yg terkait, melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran serta analisa kebutuhan anggaran setiap bagian untuk setahun mendatang.
11.	SL	Klo SOP itu berjalan sesuai dengan topoksi masing-masing karna SOP itu lahir dari setiap bidang misalnya uraian kerjanya si A si B itu kita buatkan SOP bahwasanya standar oprasionalnya kita didalam melakukan pekerjaan misalnya dibagian keuangan untuk pelaporan ada

		<p>standarnya tersendiri sehingga yg terlibat didalam penyusunan SOP ya dibidang itu sendiri jadi secara keseluruhan itu semua bidang yg terlibat karna yg tau masalah bidangnya ya bidang ituu sendiri yg bisa melahirkan SOP dan juga uraian kerja.</p>
--	--	---

Lampiran 3 Dokumentasi



lampiran 4 laporan keuangan

**PROYEKSI RENCANA
TRUSMI ANGGARAN 2022**

PERUSAHAAN (DAFTAR AIR BIRU) (PDA) (PDA)
PT TIRTA MANIKARA KABUPATEN MAKASSAR

NO	URAIAN	PROYEKSI		REALISASI TAHUN 2021	Proyeksi Tahun 2022 dibanding Proyeksi Tahun 2021	
		TRUSMI 2022	TRUSMI 2021		ANALISA	%
I.	PROYEKSI PENERIMAAN GAS :					
1.	Penerimaan Operatif :					
a.	Rencana Penerimaan Tagihan Gas, Air	22,816,282,000	17,154,175,815	17,154,175,815	1,460,131,316	8.5
b.	Rencana Penerimaan Pajak Gas Air	528,000,000	5,117,200,000	1,117,200,000	(589,199,999)	(53.7)
	Jumlah Penerimaan Operatif	23,344,282,000	22,271,375,815	18,271,375,815	4,072,906,185	
2.	Penerimaan Non Operatif :					
a.	Rencana Penerimaan Lainnya :					
-	Lain-lain	4,300,000,000	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Non Operatif	4,300,000,000	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN GAS	27,644,282,000	22,271,375,815	18,271,375,815	4,072,906,185	-
II.	PROYEKSI PENGELUARAN GAS :					
1.	Pengeluaran Operatif :					
a.	Rencana Pengeluaran Bahan & Perlong	7,244,000,000	6,901,740,000	6,901,740,000	332,260,000	30.2
b.	Rencana Pengeluaran Tenaga Kerja	3,403,263,915	3,544,700,000	4,316,700,000	(813,436,085)	(34.4)
c.	Rencana Pengeluaran Biaya Lainnya	1,841,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000	601,000,000	38.3
	Jumlah Pengeluaran Operatif	12,488,263,915	11,686,440,000	12,458,440,000	301,823,915	2.6
2.	Pengeluaran Non Operatif :					
a.	Rencana Pengeluaran di Luar Usaha	11,000,000	11,200,000	11,200,000	(200,000,000)	4.3
b.	Rencana Pengeluaran Untuk	7,200,000,000	4,700,000,000	4,100,000,000	3,100,000,000	66.4
c.	Pembiayaan KBL Daerah (PAC)	800,000,000	140,000,000	140,000,000	660,000,000	530.2
d.	Utang Gasa Pengalihan Struktur	11,000,000,000	0	0	11,000,000,000	1000.0
e.	Utang Gasa Pengalihan Struktur	4,300,000,000	4,800,000,000	4,800,000,000	(500,000,000)	(11.6)
	Jumlah Pengeluaran Non Operatif	23,700,000,000	10,840,000,000	9,240,000,000	14,460,000,000	133.3
	JUMLAH PENGELUARAN GAS	36,188,263,915	22,526,440,000	21,698,440,000	4,490,823,915	19.9
III.	KEMASAN / PEMERIKSAAN	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.0
IV.	SALDO AWAL GAS	600,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	(1,400,000,000)	(70.0)
V.	SALDO AKHIR GAS	2,200,000,000	600,000,000	600,000,000	1,600,000,000	270.0

KEPALA PERUSAHAAN (DAFTAR AIR BIRU) PT TIRTA MANIKARA



KEPALA PERUSAHAAN (DAFTAR AIR BIRU) PT TIRTA MANIKARA



Lampiran 5 surat izin meneliti

 **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 264 Makassar, 09 Maret 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini

Nama : WINDA KAPRI

Stambek : 105731111119

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN PADA PDAM TERTA
MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih

Tembusan:

1. Rektor Unimuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fsx. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talaelepong Makassar - Sulawesi Selatan

Lampiran 6 surat balasan izin meneliti



Lampiran 7 hasil turnitin



BAB II Winda Kapri 10573111119

UNIVERSITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES



repositori.uinsu.ac.id

6%



garuda.ristekdikti.go.id

3%



repositori.uhr.ac.id

3%



adoc

3%



repositori.mibos.ac.id

2%



repositori.uinsu.ac.id

2%



jurnal.uil.ac.id

2%



docplayer.info

2%



JAB III Winda Kapri 10573111119

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

5%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

RELEVANT SOURCES

- 1 Submitted to Educational Service District 105 2%
- 2 Zakia Fikri, IMPLEMENTASI KEPTAKAN PENDATAAN PENDUDUK PERMANEN DI KABUPATEN BANGGALA - JAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2020) 2%
- 3 Turmal Manik, "ANALISIS PERISALIH PENCEGAHAN KECELAKAAN DAN ANSITERLEDAK MALITA KAMPUNG BANGANG DENDU TATA NLOLA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI LABEL PEMODERASI" Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2020 2%
- 4 lib.unnes.ac.id 2%
- 5 Submitted to IAIN Purwokerto 2%
- 6 text-id.123dok.com 2%

BIOGRAFI PENULIS



Winda Kapri, lahir di Kabuloang pada tanggal 23 mei 2001, anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Kapriansa S.Pd dan ibu Wirma. Peneliti bertempat tinggal di Dusun kabuloang, Desa kabuloang, Kecamatan kalukku, kabupaten mamuju, sulawesi barat. pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN kabuloang lulus tahun 2013, SMP Negeri 3 Kalukku lulus tahun 2016, SMA Negeri 1 kalukku lulus tahun 2019 dan mulai tahun 2019 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis program studi Akuntansi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.